

PENELITIAN DASAR KEILMUAN

JUDUL
KOMPARASI :
ASPIRASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT KOTA MALANG DALAM PEMILU 2004 DAN PEMILU 2009

Oleh :
Drs. Jainuri,MSi
NIM : 103.9209.0358



Universitas Muhammadiyah Malang
Lembaga Penelitian
2010

Lembar Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian. : KOMPARASI : ASPIRASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT KOTA MALANG DALAM PEMILU
2004 DAN PEMILU 2009
2. Nama Peneliti : Jainuri
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pangkat Golongan : Penata/IIIc
5. Jabatan : Lektor
6. NIP UMM : 103.9209.0346
7. Fakultas/Jurusan : Ilmu sosial dan Ilmu politik/ Ilmu Pemerintahan
8. Jumlah peneliti : 1 Orang
9. Jangka Waktu : Delapan bulan
10. Biaya Penelitian : Rp. 6.000.000,-
11. Sumber biaya : DPP-UMM

Malang, 02 Juli 2010

Mengetahui

Dekan Fisip



Dr. Wahyudi, M.Si

Peneliti

Drs. Jamuri, M.Si

Kepala DP2M

Universitas Muhammadiyah Malang



Prof. DR. Bambang Widagdo, MM

Abstraksi

JUDUL :KOMPARASI : ASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MALANG
DALAM PEMILU 2004 DAN PEMILU 2009

1. Nama peneliti : Jainuri
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Pangkat Golongan : Penata/IIIc
4. Jabatan : Lektor
5. NIP UMM : 103.9209.0346
6. Fakultas/Jurusan : Ilmu sosial dan Ilmu politik/ Ilmu Pemerintahan

Jelang pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2009 ini, penelitian tentang perbandingan aspirasi dan partisipasi masyarakat kota Malang dalam pemilu 2004 dan pemilu 2009 menjadi menarik. Menarik karena dengan penelitian ini akan diketahui : (1). Konfigurasi aspirasi masyarakat kota Malang dalam memilih : partai politik, calon legislatif, dan pemimpin negara dalam pemilu 2004 dan pemilu 2009 ; (2). Dinamika perubahan aspirasi masyarakat kota Malang dalam memilih : partai politik, calon legislatif dan pemimpin negara dari pemilu 2004 menuju pemilu 2009; (3). Perbandingan tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat golput masyarakat kota Malang dalam pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Dinamika perubahan konfigurasi politik masyarakat kota Malang ini ditengarai disebabkan karena banyak hal antara lain : (1). Perubahan aspirasi masyarakat dalam memilih partai dan calon legislatif karena partai asalnya memiliki kinerja partai yang buruk sehingga dialihkan ke partai lain yang memiliki kinerja yang baik. (2). Perubahan aspirasi masyarakat dalam memilih pemimpin negara, karena kebijakan partai mengusung calon presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan aspirasi konstituennya, karena itu konstituen mengalihkan pilihannya kepada calon lain; (3). Tingkat partisipasi masyarakat menurun – tingkat golput naik pada pemilu tahun 2009 dibanding pemilu tahun 2004, ini disebabkan karena kinerja KPU dan jajarannya buruk, sistem pemilu rumit sehingga masyarakat enggan datang ke TPS. Tengara ini bisa benar bisa tidak, karena itu untuk membuktikan bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2009 di kota Malang sukses perlu dilakukan penelitian ini.

Kata kunci : Komparasi, aspirasi, partisipasi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
PERPUSTAKAAN PUSAT
JL. RAYA TLOGOMAS Km. 8 Telp. 552318 Malang

**Surat Keterangan / pengesahan
Laporan Hasil Penelitian**

JUDUL : **KOMPARASI : ASPIRASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT KOTA MALANG DALAM PEMILU 2004
DAN PEMILU 2009**

PENELITI :

Nama : Drs, Jainuri M.Si

NIP : 103.9209.0358

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Telah didokumentasikan sebagai bahan referensi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang pada :

No. Register : *E.66/25/Perpus-UMM/51/2012*

Tanggal : 26 Juni 2012

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 26 Juni 2012
Kepala Perpustakaan,

[Signature]
Prof. Dr. Dyah Roswitawati, MP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai apa yang dominan dipilih oleh masyarakat kota Malang, dua kali pemilu tahun 1999 dan Pileg tahun 2004, PDIP memenangkan pemilu meski dengan perolehan suara dan kursi menurun dari 18 kursi menjadi 12 kursi. Sementara pada pemilu legislatif tahun 2009 partai Demokrat menyodok kekuatan PDI-P dengan menggantikannya sebagai pemenang pemilu legislatif tahun 2009 dengan suara yang lebih meyakinkan dibanding suara PDIP tahun 2004, namun dengan perolehan kursi yang sama yakni 12 kursi. Secara sekilas jika kita telaah pada pemilu 1999 dari 24 partai dan satu kekuatan politik (TNI/Polri) hanya sembilan partai/kekuatan politik yang memiliki keterwakilan di lembaga legislatif kota Malang. Pada Pemilu legislatif 2004, lain lagi dari 48 partai hanya 8 partai yang memiliki kursi di DPRD kota Malang, sementara tahun ini (2009) dari hitungan sementara dari 38 partai yang mendapat kursi hanya 10 partai. Dari Tiga pemilu pasca reformasi tercatat hanya lima partai yang secara konstan memiliki wakil di DPRD kota Malang yakni : PDIP, PKB, Golkar, PAN, dan PK(S) dengan besaran jumlah kursi yang naik turun, yang lainnya muncul tenggelam tergantung situasi dan kondisi politik.

Apa yang kita refleksikan di atas sebenarnya, berkenaan dengan aspirasi aspirasi politik dan perubahan-perubahan aspirasi politik masyarakat kota Malang dalam memilih partai dan memilih wakil rakyat. Besar kecilnya perolehan suara partai – banyak sedikitnya keterwakilan di lembaga legislatif sebenarnya perwujudan dari kehendak masyarakat untuk memilih partai dan memilih wakil rakyat yang dianggap memiliki *kans* untuk mewakili aspirasi-aspirasi yang mengemuka dari para konstituennya. Jika kemudian berubah pilihan pada pemilu berikutnya ini juga pertanda berubahnya aspirasi konstituen yang disebabkan banyak faktor, antara lain misalnya : partai yang di pilih terdahulu ternyata tidak aspiratif, partai yang dipilihnya sekarang memiliki peluang dan menjanjikan untuk menjadi kanal bagi aspirasi-aspirasi para konstituen. Begitu juga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Respon positif dan negatif - dipilih dan tidak dipilih

terhadap calon presiden dan wakil presiden tergantung pemilih memiliki referensi, mengetahui *track record*, kedekatan organisasional dan lain sebagainya.

Seperti contohnya aspirasi masyarakat kota Malang dalam memilih presiden dan wakil presiden, penelitian yang saya lakukan tahun 2005 (Jainuri : 2005) dalam pilpres I disimpulkan : (1). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - M. Yusuf Kalla mendapat atensi dan respon “**yang sangat baik**” dari masyarakat kota Malang karena dalam pemilu kali ini memperoleh suara sebesar 37,74 % dari suara sah, disamping itu mendapat perluasan aspirasi masyarakat kota Malang sebesar 141, 27% dari jumlah modal suara pemilih partai pendukungnya. (2). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Megawati – Hasyim Muzadi mendapat atensi dan respon “**yang baik**” dari masyarakat kota Malang karena dalam pemilu kali ini memperoleh suara sebesar 33,46 % dari suara sah, dan mendapat perluasan suara pemilih sebesar 13,38% dari jumlah modal suara pemilih partai pendukungnya. (3). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden M. Amien Rais – Siswono Yudho Husodo mendapat atensi dan respon “**yang cukup baik**” dari masyarakat kota Malang karena dalam pemilu kali ini memperoleh suara sebesar 14,91 % dari suara sah, disamping itu hanya terjadi penyempitan aspirasi sebesar 7,26%. Dari jumlah modal suara yang seharusnya diterima dari suara pemilih partai koalisi pendukungnya. (4). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Wiranto – Sholahuddin Wahid mendapat atensi dan respon “**yang kurang baik**” dari masyarakat kota Malang, karena dalam pemilu 2004 ini memperoleh suara sebesar 12, 89 % dari suara sah, disamping itu terjadi penyempitan aspirasi sebesar 55,27 % modal suara yang seharusnya di peroleh dari pemilih partai pendukungnya. (5). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Hamzah Haz – Agum Gumelar mendapat atensi dan respon yang “**sangat kurang baik**” dari masyarakat kota Malang karena dalam pemilu kali ini memperoleh suara sebesar 0,99 % kurang dari 1% dari suara sah, disamping itu terjadi penyempitan aspirasi sebesar 44,38% dari modal suara yang seharusnya diperoleh dari pemilih partai pendukungnya

Pilpres ke II tahun 2004 pasangan SBY-JK mengalahkan pasangan Mega-Hasyim dengan suara yang meyakinkan 58% berbanding 42%, kemenangan

SBY-JK ini menimbulkan pertanyaan ada apa dengan aspirasi masyarakat kota Malang dalam memilih presiden dan wakil presiden, sebab seperti kita ketahui bahwa : (1). kota Malang adalah salah satu daerah basis partai banteng gemuk bermoncong putih. (2). Hasyim Muzadi yang calon wakil presiden Megawati domisilinya di lowokwaru kota Malang. Ditempat yang menjadi daerah basis PDIP dan Hasyim Muzadi, SBY-JK mendapat atensi dan respons yang sangat baik dari masyarakat kota Malang, sementara pasangan Mega Hasyim “hanya” mendapat atensi dan respon yang baik dari masyarakat kota Malang.

Tingkat partisipasi politik masyarakat kota Malang dalam pemilu legislatif 2004 cukup tinggi sebesar 70,38% dan tingkat golput cukup tinggi sebesar 29,62% sedangkan pada pemilu Presiden dan wakil presiden putaran I tingkat partisipasi politik masyarakat cukup tinggi sebesar 69,07%, tingkat golput cukup tinggi sebesar 29,93%. Jika dibandingkan antara tingkat partisipasi politik masyarakat kota Malang dalam dua pemilu tahun 2004 terjadi penurunan sebesar 1,31%, dan terjadi kenaikan tingkat golput sebesar 1,31%. Sementara pada pemilu legislatif 2009 seperti yang dilansir oleh KPUD kota Malang tingkat partisipasi masyarakat kota Malang sebesar 67% dan tingkat golput sebesar 33%.

Jelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 penelitian ini menjadi menarik. Menarik karena dengan penelitian akan diketahui : (1). Konfigurasi aspirasi masyarakat kota Malang dalam memilih : partai politik, calon legislatif, dan pemimpin negara; (2). Dinamika perubahan aspirasi masyarakat kota Malang dalam memilih : partai politik, calon legislatif dan pemimpin negara; (3). Tingkat partisipasi dan tingkat golput masyarakat kota Malang dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan pemetaan politik seperti diatas penelitian ini diberi Judul : *KOMPARASI : ASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MALANG DALAM PEMILU 2004 DAN PEMILU 2009*

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang sebagaimana tersebut diatas dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut : (1). Kepada siapa dan partai apa aspirasi masyarakat kota Malang diberikan. (2). Adakah perubahan pilihan dalam pemilu

tahun 2004 jika dibandingkan pemilu tahun 2009. (3). Seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat kota Malang dalam Pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009. Jika dibandingkan, adakah perbedaan aspirasi dan perbedaan partisipasi masyarakat kota Malang antara pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009.

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masalah seperti tersebut diatas tujuan penelitian ini adalah untuk : (1). Mengetahui aspirasi politik masyarakat kota Malang dalam memilih partai politik, memilih anggota legislatif dan memilih Presiden/Wakil Presiden. Serta ingin mengetahui kemungkinan terjadinya perubahan pilihan dalam Pemilu 2004 dibanding pemilu tahun 2009. (2). Mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat kota Malang dalam Pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009. (3). Dengan membandingkan data pemilu 2004 dan tahun 2009 penelitian ini ingin mengetahui perbedaan aspirasi politik dan perbedaan partisipasi politik masyarakat Kota Malang dalam Pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan diatas maka penelitian ini didekasikan untuk : (1). Mengembangkan model tentang : Aspirasi politik, partisipasi politik, perubahan aspirasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat golput dalam pemilu 2004 dan pemilu tahun 2009. (2). Memetakan fenomena pemilih di kota Malang dalam pemilu 2004 dan pemilu 2009, yakni bagaimana keterlibatan politik masyarakat dalam memilih partai politik, wakil rakyat (DPRD Kota/Kab, DPRD Propinsi, DPR, DPD), Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian sosial politik lebih lanjut, terutama dalam menghadapi pemilu dan pilkada berikutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

A. Aspirasi Politik Masyarakat

1. Aspirasi Masyarakat Dalam Memilih Caleg dan Partai Politik

Aspirasi politik dalam konteks pemilu adalah pilihan kepada siapa dan kepada partai politik apa masyarakat menjatuhkan pilihannya – dengan preferensi tertentu pilihan itu dianggap sebagai wahana untuk mewakili dan menyalurkan keinginan-keinginan politiknya. Memilih calon legislatif dan memilih partai berarti masyarakat menjatuhkan pilihan kepada orang dan partai tertentu yang dianggap mampu menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat, aspirasi itu kemudian diformulasikan menjadi kebijakan partai, dan kebijakan partai tujuannya diteruskan menjadi agenda kebijakan publik (agregasi kepentingan). Dengan demikian fungsi agregasi kepentingan partai adalah mengubah aspirasi masyarakat menjadi kebijakan publik. Partai, pemimpin partai dan caleg harus memiliki *sense of belonging* untuk peduli terhadap aspirasi-aspirasi yang berkembang di basis konstituennya. Dengan peduli kemudian merealisasikannya dalam kerja-kerja politik maka akan bertemu harapan konstituen dengan kebijakan partai yang dipilihnya.

Ada beberapa faktor yang menentukan pilihan orang terhadap partai dan pemimpin politik antara lain : *Pertama*, identifikasi individu terhadap partai politik dan pemimpin politik. Identifikasi ini didasarkan pada nilai-nilai primordial, rasionalitas dan *vested interest* masing masing nilai memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Identifikasi orang terhadap partai politik dan pemimpin politik yang didasarkan pada nilai-nilai primordial melahirkan pemilih yang fanatik/primordial, identifikasi orang terhadap partai politik dan pemimpin politik yang didasarkan pada rasionalitas melahirkan pemilih yang rasional, sedangkan identifikasi orang terhadap partai politik yang didasarkan pada *vested interest* melahirkan pemilih rasional yang fanatik¹.

¹ Penjelasan tentang pemilih rasional, pemilih primordial dan pemilih rasional fanatik penulis transformasi dari uraian Maswadi Rauf, ketika menjelaskan teori Geertz tentang loyalitas rasional, loyalitas primordial, loyalitas rasional fanatik. Jadi jika ada uraian tentang karakteristik pemilih

Karakteristik pemilih yang rasional adalah : pemilih yang memilih partai atas dasar rasionalitas baik buruknya kinerja partai, pilihannya tidak kekal mudah berubah, perilakunya cenderung pragmatis tidak fanatik, dasar pertimbangan untung rugi dan *take and give* artinya dukungan dan pilihan orang terhadap partai dipantulkan melalui *interest* menenggang resiko yang terkecil sedang akumulasi kepentingan atas dukungan itu adalah : “mendukung apa dan siapa untuk mendapat apa”. Dalam batas-batas tertentu pemilih ini sangat baik karena pemilih model ini menuntut orang yang menyandanginya memiliki sifat mandiri dalam menentukan sikap atau menentukan pilihan. Model ini menggunakan pendekatan individu yakni pendekatan *rational choice*, asumsinya diungkapkan oleh Enelow dan Hinich (1984, P3) bahwa : “*the theory assumes that the voter recognises his own self interest, evaluates alternatives candidats on the basis of which will be best serve this self interest, and casts his vote for candidadate most favorably evaluated*”.

Karakteristik pemilih primordial adalah : Pemilih yang memiliki kesetiaan bersifat alami dan sangat kuat sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh iming-iming materi dan jabatan. Fanatisme dan solidaritas yang tinggi - mereka mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk membela mati-matian : nilai-nilai, pemimpin dan anggota kelompok yang lain karena ada kepercayaan bahwa pemimpin dan anggota mereka tidak bersalah dan perlu dibela dari ancaman orang atau kelompok lain yang ingin menghancurkan kelompok primordial mereka. Dukungan didasarkan pertimbangan emosional dan perasaan, pemilih seperti ini mendukung kelompok dan nilai-nilai kelompok tidak didasarkan pertimbangan rasional tapi lebih pada pertimbangan emosional dan perasaan misalnya : karena teman, saudara, kelompok, suku, nilai-nilai kelompok dan lain-lain. Sikap politik para pemilih primordial relatif tergantung kepada elit primordial, mereka cenderung “kurang mandiri” kalau tidak mau dikatakan “tidak mandiri” dalam menentukan sikap politik; ketergantungan kepada elit bisa berkenaan dengan menentukan sikap terhadap kebijakan partai, kebijakan publik, memilih

yang memiliki loyalitas rasional mestinya ada penjelasan tentang karakter pemilih rasional. Lebih lanjut tentang ini bisa dilihat di halaman

pemimpin dan lain sebagainya. Pemilih model ini selaras dengan pendekatan kelompok atau pendekatan sosiologis seperti yang diungkapkan Harop dan Miller (1987 : 130).

Pemilih rasional yang fanatik adalah gabungan sifat pemilih primordial dan pemilih yang rasional karena gabungan perilaku yang berlawanan maka menimbulkan sikap yang unik pada diri orang atau sekelompok orang yang memilikinya, dalam konteks tertentu orang yang memiliki karakteristik ini merespons sesuatu dengan mendahulukan emosi daripada rasio namun dalam konteks yang lain mendahulukan rasionalitas dari pada emosional.

Kedua, Tergantung pada kinerja partai yaitu dinamika partai politik menjalankan peran-peran politiknya. Dinamika partai politik menjalankan peran-peran politik ini adalah kemampuan partai menjalankan fungsi-fungsi sebagai : (a). sarana sosialisasi politik – partai dan pemimpin partai melakukan pendidikan politik rakyat berkenaan dengan nilai-nilai, tujuan, visi, misi dan aksi, program dan kebijakan politik partai. (b). saluran komunikasi politik – partai dan pemimpin partai mempertemukan antara kebijakan pemerintah disatu sisi dan aspirasi masyarakat masyarakat disisi lain, atau sebaliknya (c). agregasi kepentingan publik – partai dan pemimpin partai menangkap dan memformulasikan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat kemudian di format menjadi kebijakan partai, kebijakan partai menjadi agenda kebijakan publik, (d). sarana rekrutmen politik – partai dan pemimpin partai berusaha memobilisasi masyarakat menjadi simpatisan partai, simpatisan partai menjadi anggota partai, anggota partai menjadi kader partai, kader partai menjadi pemimpin partai, pemimpin partai menjadi pemimpin pemerintahan (eksekutif dan legislatif) diberbagai level tingkatan. (e). terakhir partai sebagai sarana mengelola konflik – partai dan pemimpin partai mampu meredam konflik internalnya sekaligus juga memiliki kapasitas untuk mengelola konflik eksternal dengan pihak lain (partai kompetitor, pemerintah, LSM, Ormas, Media massa, tokoh masyarakat dan lain-lain). Jika partai mampu menjalankan fungsi-fungsi seperti tersebut diatas maka partai itu memiliki kinerja yang baik dan memiliki kapasitas untuk menarik massa sebanyak-banyaknya.

Menghubungkan antara variabel karakter pemilih dengan aspirasi memilih partai, tiga jenis pemilih diatas diformulasikan secara sederhana dalam ilustrasi sebagai berikut : Pemilih yang rasional : (a). akan memilih partai yang memiliki kinerja yang baik. (b). pemilih ini bersifat pragmatis tidak terlalu fanatik, tetap atau berubah pilihan terhadap partai dilakukan atas dasar rasionalitas baik buruknya kinerja partai, (c). jika partai yang dipilihnya terdahulu ternyata tidak memiliki kinerja yang baik maka pemilih ini akan mudah berubah pilihan kepada partai lain yang dianggapnya memiliki kinerja yang baik. (d). pemilih model ini relatif otonom dan mandiri dalam menentukan sikap termasuk memilih partai dan merubah pilihannya kepada partai lain.

Pemilih primordial : (a). memilih partai didasarkan atas kesamaan ikatan, sentimen nilai-nilai primordial bukan hanya sekedar pada kinerja partai; (b). pemilih model ini lebih banyak menggunakan pertimbangan perasaan dan emosi dalam memilih partai karena itu sangat fanatik – buruk kinerja partai bukan halangan bagi pemilih ini untuk tetap setia mendukungnya. (c). Dalam menentukan pilihan atau tetap setia kepada partai, pemilih model ini relatif tidak mandiri mereka tergantung pada elit primordial.

Pemilih yang rasional fanatik : (a). memilih partai yang menguntungkan – pertimbangan akumulasi untung rugi menjadi dasar memilih partai (b). jika partai menguntungkan eksistensi dirinya maka pemilih ini akan tetap setia, jika tidak ia akan mencari partai lain yang dianggap lebih menguntungkan; (c). pemilih yang memiliki ikatan longgar terhadap partai meski kelihatannya fanatik – fanatisme diekspresikan dalam rangka memperoleh keuntungan akumulatif; (d). mendahulukan kepentingan pribadi dan relatif otonom memilih partai – *interest* pribadi lebih utama daripada eksistensi partai, karena itu kadang-kadang kemandiriannya membahayakan keutuhan partai, demi keuntungan pribadi perilaku antagonistik, oportunistik, dan penggunaan sentimen primordial bisa dilakukan.

2. Perubahan Aspirasi Masyarakat Memilih Partai/Pemimpin politik

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa aspirasi politik masyarakat dalam pemilu adalah pilihan kepada siapa dan kepada partai politik apa masyarakat

menjatuhkan pilihannya – dengan preferensi tertentu pilihan itu dianggap sebagai wahana untuk mewakili dan menyalurkan keinginan-keinginan politiknya, namun pilihan terhadap partai/pemimpin politik itu karena alasan-alasan tertentu bisa jadi berbeda sama sekali dengan pilihan pada pemilu sebelumnya (perubahan aspirasi). Perubahan-perubahan aspirasi memilih partai terjadi karena identifikasi pemilih terhadap partai tidak kongruen dengan kinerja partai itu sendiri, sementara partai lain lebih menjanjikan dan dianggap memiliki kinerja yang baik serta mampu menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat (pemilih).

Mengapa terjadi perubahan aspirasi dalam memilih partai dan pemimpin politik², ini bisa dijelaskan dengan menggunakan teori Geertz . Menurut Maswadi Rauf (2001 : 67) ketika mengulas teori konflik berdasarkan nilai budaya Geertz menjelaskan ada tiga macam loyalitas orang terhadap partai politik yakni : loyalitas politik (loyalitas rasional), loyalitas primordial (loyalitas fanatik) dan gabungan loyalitas primordial dan loyalitas politik (loyalitas politik yang fanatik). Adapun karakteristik ketiga loyalitas tersebut diatas dapat didiskripsikan sebagai berikut :

Karakteristik loyalitas politik adalah : Kesetiaan yang berdemensi rasional, tidak kekal, cenderung pragmatis, tidak fanatik. Pertimbangan untung rugi artinya dukungan dan loyalitas orang terhadap partai politik dipantulkan melalui kepentingan untuk keuntungan pribadi sedang akumulasi kepentingan atas dukungan itu adalah : “mendukung apa dan siapa untuk mendapat apa”. Dalam batas-batas tertentu loyalitas ini sangat baik karena kesetiaan ini menuntut orang yang memilikinya bersifat mandiri dalam menentukan sikap.

Karakteristik loyalitas primordial³ (Maswadi Rauf : 67-69) adalah : Kesetiaan yang bersifat alami dan sangat kuat sehingga tidak mudah tergoyahkan

² Pemimpin politik bisa dalam pengertian calon anggota DPRD, calon anggota DPRD Propinsi, Calon DPR, Calon anggota DPD, calon presiden dan Wakil presiden.

³ Loyalitas primordial adalah keajegan orang atau sekelompok orang untuk menerima, melaksanakan, dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi pola kehidupannya sehari-hari. Nilai-nilai budaya bisa berasal dari faktor geneologis atau hasil interaksi dengan lingkungan. faktor geneologis seperti suku dan agama adalah nilai-nilai budaya yang sudah *given* tidak bisa ditolak oleh individu, karena nilai-nilai budaya ini adalah “bawaan” sejak lahir. Itulah nilai-nilai budaya yang mempengaruhi identitas sosial berdasarkan suku dan agama yang pada

bahkan mungkin tidak tergoyahkan oleh iming-iming materi dan jabatan. Fanatisme dan solidaritas yang tinggi karena itu setiap anggota mempunyai kecenderungan tinggi untuk membela mati-matian : nilai-nilai, pemimpin dan anggota kelompok yang lain karena ada kepercayaan bahwa pemimpin dan anggota mereka tidak bersalah dan perlu dibela dari ancaman orang atau kelompok lain yang ingin menghancurkan kelompok primordial mereka - termasuk nilai-nilai yang mendasari kelompok primordial tersebut. Dukungan didasarkan pertimbangan emosional dan perasaan, dalam kesetiaan seperti ini dukungan kepada anggota kelompok dan nilai-nilai kelompok tidak didasarkan pertimbangan rasional tapi lebih pada pertimbangan emosional dan perasaan misalnya : teman, saudara, kelompok, suku, nilai-nilai kelompok dan lain-lain. Ketergantungan terhadap elit primordial, sikap politik para pemilih yang memiliki loyalitas primordial relatif tergantung kepada elit primordial, mereka para loyalis primordial itu cenderung “kurang mandiri” kalau tidak mau dikatakan “tidak mandiri” dalam menentukan sikap politik ; ketergantungan kepada elit bisa berkenaan dengan menentukan sikap terhadap kebijakan partai, kebijakan publik, memilih pemimpin dan lain sebagainya.

Loyalitas politik yang fanatik adalah gabungan loyalitas primordial dan loyalitas politik karena gabungan perilaku yang berlawanan maka menimbulkan sikap yang unik pada diri orang atau sekelompok orang yang memilikinya, dalam konteks tertentu orang yang memiliki karakteristik ini merespon sesuatu dengan mendahulukan emosi daripada rasio namun dalam konteks yang lain mendahulukan rasionalitas dari pada emosional, sebagai contoh pada pemilu 2004 yang lalu ada sekelompok elit partai yang membuat pernyataan, membuat corat-corek di jalan-jalan dan di tembok-tembok kota, memasang poster bahkan melakukan kampanye,: “Amien Rais yes, PAN No” ini adalah contoh dari manifestasi loyalitas politik yang fanatik. Secara primordial mereka sangat fanatik mendukung Amien Rais sebagai figur pimpinan, tetapi karena mereka tidak diuntungkan oleh struktur PAN di kota Malang bahkan mereka tersingkir dari

akhirnya melahirkan ikatan, sentimen dan loyalitas primordial lebih detail lihat (Maswadi Rauf : 67-69)

kepengurusan DPD pada saat menjelang pemilu 2004, maka rasionalitas mereka mendorong untuk melakukan pembusukan politik di tubuh Partai Amanat Nasional. Adapun Karakteristik loyalitas politik yang fanatik adalah sebagai berikut : (a). mendahulukan kepentingan sendiri; (b). memilih yang menguntungkan; (c). ikatan longgar meskipun kelihatannya fanatik; (d). aktivitasnya membahayakan keutuhan partai; (e). manipulasi dukungan primordial untuk kepentingan politik pribadi/ kelompok.

Dari uraian diatas tentang loyalitas pemilih partai dan kemungkinan perubahan pilihan partai dapat konklusikan sebagai berikut :

- (1). Pemilih yang rasional memiliki ikatan, sentimen dan loyalitas yang longgar terhadap partai atau pemimpin partai, jika partai dan pemimpin partai tidak menunjukkan kinerja yang baik bahkan penuh konflik pemilih model ini dengan mudah pindah ke partai lain.
- (2). Pemilih yang primordial memiliki ikatan, sentimen dan loyalitas yang kuat terhadap partai atau pemimpin partai, jika partai dan pemimpin partai tidak menunjukkan kinerja yang baik bahkan penuh konflik pemilih model ini tidak mudah pindah ke partai lain.
- (3). Pemilih yang rasional fanatik memiliki ikatan, sentimen dan loyalitas yang longgar tetapi jika situasi menguntungkan ia akan menunjukkan kefanatikannya, Sikap terhadap konflik partai juga demikian, jika menguntungkan ia tetap di partai tetapi jika merugikan pemilih model ini akan pindah ke partai lain.
- (4). Dari tiga jenis pemilih diatas – jelaslah bahwa pemilih yang rentan berubah aspirasi politiknya adalah pemilih yang memiliki loyalitas rasional dan loyalitas rasional yang fanatik sementara pemilih yang memiliki loyalitas primordial adalah pemilih yang sulit berubah dalam memilih partai politik.

Dalam kurun waktu lima tahun dari pemilu 2004 ke pemilu 2009, perubahan aspirasi masyarakat dalam memilih partai disebabkan hal-hal sebagai berikut : (1). Perubahan aspirasi masyarakat dalam memilih partai dari partai lama yang berpenampilan kurang bahkan tidak aspiratif, kepada partai lama yang lebih meyakinkan dalam performa kinerja partai selama kurun waktu 2004 – 2009 misalnya dari PAN, PBB, PPP ke PK(S); (2) Perubahan aspirasi masyarakat

dalam memilih partai dari partai lama yang berpenampilan kurang bahkan tidak aspiratif, kepada partai baru yang diprediksi lebih meyakinkan dalam performa kinerja partai di masa mendatang, misalnya dari PDIP-Golkar ke Partai demokrat; (3). Perubahan aspirasi masyarakat memilih partai dari partai satu ke partai lain karena sebab-sebab lain : misalnya daftar calon tetap legislatif yang diusung tidak berkualitas, calon legislatif yang diusung tidak berdasarkan mekanisme internal partai yang demokratis, calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai tidak sesuai dengan aspirasinya, terjadinya konflik internal partai yang berkepanjangan dan tak terselesaikan. Namun juga karena alasan-alasan pragmatis misalnya karena iming-iming jabatan, uang, fasilitas dan lain-lain

Bagi partai politik, perubahan aspirasi politik masyarakat ini berakibat terjadinya peningkatan dan penurunan perolehan suara dalam pemilu, sekaligus juga peningkatan dan penurunan jumlah perolehan kursi di lembaga parlemen dalam berbagai tingkatan. Akibat dari perubahan aspirasi politik masyarakat terjadi hal-hal seperti dibawah ini : (1). Perolehan suara partai yang pada pemilu 2004 sangat dominan pada pemilu legislatif 2009 ini berkurang sangat mencolok dan ini berpengaruh terhadap perolehan kursi di lembaga legislatif lokal ; (2). Perolehan suara partai yang pada pemilu 2009 cukup signifikan untuk memperoleh kursi di setiap DP/kecamatan pada pemilu legislatif 2009 ini berkurang sehingga berpengaruh terhadap perolehan kursi di parlemen lokal; (3). Perolehan suara partai yang pada pemilu 2004 kurang signifikan pada pemilu legislatif 2009 ini terjadi kenaikan yang mencolok dan ini berpengaruh terhadap bertambahnya perolehan kursi di lembaga legislatif; (4). Perolehan suara partai yang pada pemilu 2004 kurang signifikan tetapi karena duntungkan oleh sistem pemilu sehingga mendapatkan kursi, pada pemilu legislatif 2009 ini perolehan suara partai tersebut berkurang tetapi tetap memperoleh kursi; (5). Perolehan suara partai yang pada pemilu 2004 cukup signifikan untuk memperoleh kursi di tiap kecamatan pada pemilu legislatif 2009 ini berkurang cukup mencolok akan tetapi karena diuntungkan oleh sistem pemilu perolehan kursi di DPRD malah meningkat; (6). Partai yang pada tahun 2004 tidak mengikuti pemilu (Partai baru

atau inkarnasi partai lama) pada pemilu legislatif 2009 ini malah memperoleh kursi di DPRD.

Demikian juga jika diamati dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 juga terjadi pengalihan aspirasi pemilih partai antara lain : (1). Penambahan suara pemilih yang sangat banyak, ini terjadi karena suara yang dihasilkan oleh calon Presiden dan wakil presiden pada pilpres I jauh lebih besar dibanding modal suara yang dimiliki oleh partai pengusung calon Presiden dan wakil presiden; (2) pengalihan suara pemilih yang banyak, ini terjadi karena suara yang dihasilkan oleh calon presiden dan wakil presiden pada pilpres I relatif lebih besar dibanding modal suara yang dimiliki oleh partai pengusung calon Presiden dan wakil presiden; (3). Penyempitan suara pemilih yang relatif sedikit, ini terjadi karena suara yang dihasilkan oleh calon presiden dan wakil presiden pada pilpres I lebih kecil dibanding modal suara yang dimiliki oleh partai pengusung calon Presiden dan wakil presiden; (4). Penyempitan suara pemilih cukup banyak, ini terjadi karena suara yang dihasilkan oleh calon presiden dan wakil presiden pada pilpres I jauh relatif lebih kecil dibanding modal suara yang dimiliki oleh partai pengusung calon Presiden dan wakil presiden; (5). Penyempitan suara pemilih sangat banyak, ini terjadi karena suara yang dihasilkan oleh calon presiden dan wakil presiden pada pilpres I jauh lebih kecil dibanding modal suara yang dimiliki oleh partai pengusung calon Presiden dan wakil presiden.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan dan pengalihan suara pemilih adalah : (1). Kebijakan partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden tertentu tidak sesuai dengan aspirasi pilihan anggota/simpatikan partai pendukungnya, sehingga terjadi penolakan terhadap kebijakan partai dalam mengusung calon oleh para pendukung partai. (2). Kapasitas calon yang diusung oleh koalisi partai tidak sesuai dengan standart yang diinginkan oleh anggota partai pendukungnya. (3). Pemanfaatan jaringan dan mesin politik tim sukses yang tidak maksimal dalam memenangkan calon yang diusung. (4). Strategi, cara, teknik dan taktik kampanye serta pemanfaatan media kampanye yang kurang bahkan tidak menarik.(5). Kurang tersedianya sarana prasarana dan

tidak memadainya anggaran untuk menopang kampanye calon presiden dan wakil presiden.

B. Partisipasi Politik Masyarakat

1. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pencontrengan

Formulasi tentang partisipasi politik sangat beragam dan terderivasi dalam berbagai tingkatan, antara lain seperti dikemukakan oleh Kevin R. Hardwick bahwa : "Partisipasi politik memberi perhatian pada cara – cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan – kepentingan mereka terhadap pejabat – pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan – kepentingan tersebut" (Magill, 1996 : 1016). Dengan demikian partisipasi politik adalah wahana mempertemukan antara aspirasi masyarakat disatu sisi dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah disisi lain. Kongruensi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah menjadi titik temu partisipasi politik masyarakat.

Ramlan Surbakti (1992 : 141-142) mengemukakan rambu – rambu konsep partisipasi politik sebagai berikut : *Pertama*, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. *Kedua*, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk kedalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah. *Ketiga*, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. *Keempat*, kegiatan mempengaruhi pemerintah bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. *Kelima*, kegiatan mempengaruhi pemerintah bisa dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tidak berupa kekerasan (*nonviolence*) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara – cara diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (*violence*), seperti demonstrasi (unjuk rasa)

pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru – hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan – gerakan politik seperti kudeta dan revolusi

Sementara mengenai tingkatan partisipasi Huntington dan Nelson, Rush dan Althoff menyatakan bahwa hierarki yang ada dalam partisipasi politik bisa dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap sistem politik, tingkatan – tingkatan dengan intensitas partisipasi khusus menyebabkan akibat besar pada sistem politik, sementara intensitas partisipasi yang kecil berakibat kecil kecil atau tanpa mempunyai akibat apapun terhadap sistem politik (Rush dan Althoff : 124) tingkatan partisipasi politik ini diilustrasikan seperti dibawah ini :

1. Menduduki jabatan politik atau administratif
 2. Mencari jabatan politik atau administratif
 3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
 4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
 5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi – political)
 6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
 7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
 8. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik
- Voting* (pemberian suara) (Deden : 2002, 195).

Berdasarkan batasan-batasan dan tingkatan partisipasi politik diatas dalam penelitian ini peneliti memfokuskan partisipasi politik pada konteks *voting* yakni keikutsertaan masyarakat melakukan pemilihan/pencoblosan dalam pemilihan umum. Herbert McClosky mengatakan bahwa : “partisipasi politik adalah kegiatan – kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”. (dalam Miriam Budiardjo, 1994 : 183-184).

Pembatasan ini dilakukan dengan alasan sebagai berikut :(1). Meski *voting* merupakan partisipasi politik yang intensitas dan tingkatannya dianggap paling rendah namun pelibatan masyarakat yang paling banyak (kecuali mereka yang golput), merupakan pelibatan masyarakat yang riil dalam memilih partai,

wakil rakyat maupun pemimpin negara. (2). *Voting* yang dilakukan reguler setiap lima tahun sekali merupakan bentuk pelibatan masyarakat riil dalam menentukan wakil rakyat dan pemimpin negara, Karena yang dipilih adalah wakil rakyat dan pimpinan negara yang menentukan berbagai kebijakan negara maka *voting* merupakan sarana untuk melakukan perubahan sistem politik yang lebih baik. (3). *Voting* merupakan usaha-usaha untuk memperbaiki sistem politik yang lebih baik dengan melibatkan warga negara, karena itu *voting* adalah sarana perbaikan sistem politik dengan cara-cara yang demokratis. (4). Menurut peneliti memperhatikan partisipasi politik masyarakat dalam bentuknya *voting* adalah partisipasi yang paling sederhana tidak rumit, gejalanya tampak dan dapat didiskripsikan lebih simpel dibanding partisipasi bentuk lain misalnya demonstrasi, meraih jabatan dan-lain-lain.

2. Tidak Berpartisipasi Dalam Pemilu/Tidak mencontreng

Penjelasan tentang tidak berpartisipasi dalam pemilu (golput) bisa dirujuk pada pendapat Milbrath M.L. Goel (dalam Kay Lawson : 218) yang mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik individu, salah satu bentuknya Milbrath menyebut sebagai *Apathetic Inactives* : yakni tidak beraktifitas yang partisipasif, tidak pernah memilih dalam pemilu. Persoalannya kemudian adalah mengapa masyarakat tidak ikut memilih (golput), menurut konstataasi Heru (2004) alasan masyarakat tidak memilih antara lain :(1) Tidak paham terhadap masalah politik sehingga ia tidak mampu atau mau terlibat dalam kegiatan politik, (2) Ia tidak yakin akan hasilnya. Keikutsertaannya tidak akan membawa pengaruh positif bagi keadaan yang ada, (3) Ia merasa puas terhadap keadaan yang ada dan menganggap keadaan tidak terlalu buruk, apa pun hasil pemilihan tidak akan mengubah keadaan. Ini banyak terjadi di negara dengan sistem politik yang sudah mapan, dan (4) Ia berada dalam lingkungan yang memandang tinggi orang yang yang tidak berpartisipasi.

Dari konstruksi konsep diatas jelaslah bahwa : (1). Golput dilakukan masyarakat bukan karena mereka tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, namun yang terjadi justru sebaliknya mereka ini melakukan golput karena apatis dan

beranggapan bahwa keterlibatannya dalam pencoblosan tidak akan mempengaruhi sistem politik menjadi baik, karena itu tidak keharusan bagi mereka untuk mendatangi TPS-TPS yang disediakan. (2). Golput dilakukan oleh warga negara karena melihat partai-partai yang dominan dalam pemerintahan (eksekutif dan legislatif) tidak memiliki kinerja yang baik, penuh konflik, tidak mampu menjadi alat agregasi kepentingan. (3). Golput dilakukan oleh masyarakat karena KPU sebagai penyelenggara pemilu kurang memiliki kinerja yang baik, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem yang rumit membingungkan. (4). Namun golput juga terjadi karena masyarakat tidak memahami sistem penyelenggaraan pemilu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang deskriptif yaitu “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggerakkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak”.(Nawawi, 1993 : 63). Peneliti ingin mendiskripsikan tentang fenomena yang terjadi dalam pemilu 2004 dan pemilu 2009 di kota Malang, antara lain tentang : (1). Aspirasi masyarakat dalam memilih partai politik pada pemilu tahun 2004 dan pemilu 2009; (2). Aspirasi Masyarakat dalam memilih wakil rakyat pada pemilu 2004 dan pemilu tahun 2009; (3). Aspirasi Masyarakat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2004 dan pemilu 2009; (4). Partisipasi dan golput masyarakat kota Malang dalam pemilu 2004 dan pemilu tahun 2009; (5). Partisipasi dan golput masyarakat dalam pemilu presiden 2004 dan pemilu 2009, dengan menggunakan analisis tabel dengan perhitungan menggunakan prosentase.

Selain itu, dipadukan studi komparatif “sejenis penelitian diskriptif yang ingin menjawab tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu dalam jangkauan waktu sekarang” (Nawawi, 1985 : 63). Dalam hal ini akan dibandingkan beberapa hal : (1). Prosentase tingkat partisipasi politik masyarakat kota Malang dalam 2004 dibandingkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2009 2004 per Daerah pemilihan (DP-Kecamatan) dan dalam sekup kota Malang. (2). Prosentase tingkat pemilih golput masyarakat kota Malang dalam pemilu 2004 dibandingkan tingkat pemilih golput pada pemilu tahun 2009. (3). Membandingkan aspirasi, pergeseran aspirasi dan keterwakilan partai dilembaga DPRD kota Malang dalam Pemilu 2004 yang lalu dengan pemilu tahun 2009. (4). Mencari sebab mengapa terjadi perbedaan tingkat partisipasi masyarakat sekaligus tingkat golput dalam pemilu 2004 dan pemilu tahun 2009.

Pengumpulan data digunakan teknik observasi, teknik komunikasi langsung dan teknik dokumentasi. *Teknik pertama* (observasi), peneliti

mendatangi dan mengamati situasi *moment* sebelum, pada saat dan pasca pencoblosan di beberapa tempat/TPS seperti di kelurahan Sumbersari, kelurahan Merjosari, kelurahan Tlogomas, Kelurahan Dinoyo, Bumiayu dan lain-lain. Sementara *teknik kedua* (komunikasi langsung) yang akan digunakan adalah teknik *elite interviewing* (Manheim dan Rich, 1981:134) berupa wawancara tidak terstruktur yang dilakukan terhadap orang yang dianggap mengetahui dan mengerti tentang masalah yang dirumuskan. Instrumen yang digunakan sebagai panduan dalam teknik ini adalah daftar wawancara, yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan menjaga dan membatasi topik wawancara. *Teknik ketiga* (dokumentasi) secara operasional berupaya mengumpulkan data berdasarkan pada dokumentasi mengenai Aspirasi dan partisipasi pemilih di Kota Malang dalam Pemilu 2004 dan Pemilu tahun 2009, baik yang diperoleh dari KPU, Partai politik, Tim Sukses Calon Presiden dan Wakil Presiden, maupun dari media Massa yang memuat berita tentang pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel tetapi menggunakan subyek penelitian, adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah tokoh masyarakat di kota Malang yang dianggap memahami tahapan-tahapan pemilu mulai proses, pelaksanaan dan hasil-hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2004 dan tahun 2009 di Kota Malang antara lain :

1. Seorang anggota KPU kota Malang
2. Salah seorang Pimpinan partai yang mendapat Kursi DPRD di Kota Malang seperti : PKS dan 2 orang PAN
3. Tokoh masyarakat dari NU dan Muhammadiyah

B. Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data yang di dapat dari wawancara dan sejumlah dokumen. Data yang didapat, dibuat dalam bentuk laporan deskripsi yang berisi narasi kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan perilaku pemilih kota Malang dalam Pemilu legislatif dan Pemilu presiden 2004 dan pemilu 2009, biasanya analisa kualitatif ini meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Berhubung data yang diperoleh banyak berupa angka-angka dalam tabel, data-data statistik maka peneliti perlu melakukan kuantifikasi misalnya untuk “mengukur” *voter turnover* pemilu dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik sederhana yakni prosentase dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah pemilih yang memilih}}{\text{Jumlah pemilih}} \times 100\% = \text{Tingkat Partisipasi Politik}$$

selanjutnya dilakukan pengkategorian dengan menggunakan *skala Likerts*, penilaian terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat kota Malang tersebut dibagi menjadi lima kategori :

- a. Sangat tinggi, jika mencapai prosentase antara 89 – 100 %
- b. Tinggi, jika mencapai prosentase antara 77 – 88%
- c. Cukup Tinggi, jika mencapai prosentase antara 65 – 76%
- d. Rendah, jika mencapai prosentase antara 53 – 64%
- e. Sangat rendah, jika mencapai prosentase antara 41 – 52%

Penggunaan jarak interval diatas konsisten yaitu “12, 12, 12, 12, 12”, namun nilai interval tidak dimulai dari nol tetapi dimulai dari batas bawah 41 dan batas atas 100 karena berdasarkan kalkulasi yang peneliti lakukan tingkat partisipasi terendah dalam penelitian ini mencapai angka 43,48 tertinggi mencapai 84,59. Jarak interval 12 hasil dari $(100 - 41) : 5$ dibulatkan menjadi 12. Ini kami gunakan karena dalam perhitungan tingkat partisipasi terdapat “nilai kritis” yang batas pangkategorian menjadi agak kabur antara “sangat tinggi”, “tinggi”, dan “cukup tinggi” sehingga perlu penegasan yang memadai agar pembaca - bisa membedakan setiap gejala yang muncul.

Sedangkan untuk tingkat pemilih “golput” digunakan rumusan yang sama dengan formulasi tingkat partisipasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemilih yang "golput"}}{\text{Jumlah pemilih}} \times 100\% = \text{Tingkat "Golput"}$$

Pengkategorian tingkat pemilih golput menggunakan batas bawah dan batas atas antara 0 – 59%, hal ini didasarkan pada kalkulasi data awal yang peneliti peroleh tidak ada satupun tingkat golput masyarakat yang berbasis kecamatan maupun berbasis kelurahan prosentasenya lebih dari 60% yang tertinggi hanya 57,42%, kemudian jarak interval sama dengan tingkat partisipasi diatas “12, 12, 12, 12, 12”, dirumuskan dalam lima kategori sebagai berikut :

- a. Sangat tinggi, jika tingkat golput prosentase antara 48 –59%
- b. Tinggi, jika tingkat golput prosentase antara 36 – 47%
- c. Cukup tinggi, jika tingkat golput prosentase antara 24 – 35%
- d. Rendah, jika tingkat golput prosentase antara 12 – 23%
- e. Sangat rendah, jika tingkat golput prosentase antara 0 - 11%

Karena prosentase tingkat partisipasi politik berbanding terbalik dengan tingkat golput maka pengkategorianya dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kategori	Tingkat Partisipasi Politik	Tingkat Pemilih Golput	Kategori
Sangat tinggi	89 – 100 %	0 - 11%	Sangat rendah
Tinggi	77 – 88%	12 - 23%	Rendah
Cukup Tinggi	65 – 76%	24 - 35%	Cukup tinggi
Rendah	53 – 64%	36 – 47%	Tinggi
Sangat rendah	41 – 52%	48 – 59%	Sangat tinggi

BAB IV

TEMUAN LAPANGAN

Dalam pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian : *Pertama*, mengenai aspirasi masyarakat kota Malang dalam memilih partai dan memilih pemimpin politik; *Kedua*, berkenaan tentang perubahan-perubahan aspirasi masyarakat kota Malang dalam pemilihan umum; *Ketiga*, berkenaan dengan Perbandingan Partisipasi masyarakat kota Malang dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2009

A. Masyarakat Kota Malang : Aspirasi Memilih Partai & Pemimpin Politik⁴

1. Peta Pemilih Legislatif di Kota Malang Tahun 2009.

Di Kota Malang, dalam pemilu legislatif tanggal 9 Juni 2009 seperti yang dilansir oleh media massa dan pengumuman dari KPUD kota Malang, peta pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 570.885 orang terdiri dari : Kecamatan Kedungkandang sebanyak 123.829 pemilih, Kecamatan Sukun 131.996 pemilih, Kecamatan Klojen sebanyak 84.242 pemilih, Kecamatan Blimbing sebanyak 124.150 orang dan Kecamatan Lowokwaru sebanyak 106.668 orang. Dari hasil pemilu diketahui pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 374.507 orang atau setara 65,60% yang tak menggunakan hak pilih/golput dan suara rusak sebanyak 196.378 pemilih atau setara 34,40%.

Pemilih yang menggunakan hak pilih kisaran antara 61% s/d 68%, yang tak menggunakan hak pilih kisaran antara 32% s/d 39%. Prosentase terbesar penggunaan hak pilih berada di kecamatan Sukun sebesar 67,51%, yang terendah berada di kecamatan Klojen. Prosentase terbesar tak menggunakan hak pilih berada di kecamatan Klojen sebesar 38,37% dan terkecil berada di kecamatan Sukun sebanyak 32,49%. Rata-rata prosentase tak menggunakan hak pilih sebanyak 65,60%. Secara detail peta pemilih kota Malang seperti tertera dalam tabel berikut ini:

⁴ Pemimpin politik yang dimaksud DPRD, DPR Propinsi, DPR, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden, namun dalam penelitian ini dibatasi anggota DPRD kota Malang dan Presiden/wakil presidien. Sementara DPRD Propinsi, DPD dan DPR tidak dibahas karena menyangkut daerah pemilihan lain seperti kota Batu dan kabupaten Malang.

Tabel 1.
Peta Pemilih Legislatif di Kota Malang Tahun 2009

Kecamatan	Jumlah Pemilih Berdasarkan DPT	Jumlah Pemilih Menggunakan Hak pilih	Pemilih Tak Menggunakan Hak pilih	Prosentase Pemilih Menggunakan Hak pilih	Prosentase Pemilih tak Menggunakan Hak pilih
Kedungkandang	123.829	82.392	41.437	66,53%	33,47%
Sukun	131.996	89.121	42.875	67,51%	32,49%
Klojen	84.242	51.918	32.324	61,63%	38,37%
Blimbing	124.150	79.558	44.592	64,08%	35,92%
Lowokwaru	106.668	71.518	35.150	67,04%	32,96%
Jumlah	570.885	374.507	196.378	65,60%	34,40%

Sumber : data skunder KPUD Kota Malangyang di olah.

Jumlah pemilih diatas lebih kecil dibanding jumlah pemilih legislatif tahun 2004 yakni sebesar 603.029 pemilih, dan pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 424.435 atau sebesar 70,38%. Komunikasi pribadi peneliti (19-5-2010) dengan salah seorang anggota KPUD kota Malang, peneliti menanyakan perbedaan jumlah pemilih tersebut diatas, kepada peneliti ia mengatakan : ”Jumlah pemilih tahun 2009 dilakukan dengan cara hati-hati siapa yang memiliki hak untuk memilih di buktikan dengan KTP atau kartu keluarga yang bersangkutan akan di data di DPT, sementara data pemilih tahun 2004 agak serampangan contohnya di Kecamatan Lowokwaru – semua mahasiswa yang berdomisili di Lowokwaru – memiliki KTP kota Malang atau tidak - tetap didaftar sebagai pemilih di DPT, akibatnya jumlah pemilih pembengkak, sementara ketika pemilu berlangsung yang bersangkutan pulang kampung, akibatnya suara golput di Lowokwaru pada pileg 2004 sangat besar”.

2. Aspirasi Memilih Partai Tahun 2009 : Partai Demokrat Mengalahkan PDIP

Penjelasan tentang aspirasi-aspirasi yang berkembang di kota Malang, untuk memilih partai politik dapat diketahui dari hasil pemilu legislatif tanggal 9 Juni 2009. Seperti yang dilansir oleh KPUD kota Malang melalui berbagai sarana

termasuk media massa, partai yang menjadi kanal aspirasi masyarakat kota Malang dari yang teratas sampai kebawah adalah partai partai sebagai berikut :

Tabel 2
Partai Pilihan Masyarakat &
Perolehan Suara Partai Dalam Pileg 2009 di Kota Malang

Partai	Sukun	Kedung Kandang	Lowok waru	Klojen	Blimbing	Jumlah
Partai Demokrat	17248	15151	17355	14464	24832	89050
PDIP	18762	15985	11370	7150	12118	65385
PKB	8081	11880	3309	5499	6762	35531
PKS	5323	5579	6201	3312	5231	25646
Golkar	9063	4625	3091	2683	4887	24349
PAN	2067	3396	4394	3431	3556	16844
GERINDRA	3551	3970	2543	1292	2911	14267
PDS	2696	1820	1587	2157	2103	10363
Hanura	2513	1823	2021	763	2982	10102
PKPB	752	901	4984	655	464	7756

Sumber : Data skunder diolah dari KPUD kota Malang

Keterangan : dicantumkan hanya partai yang mendapat kursi di parlemen lokal kota Malang

Tabel diatas, menggambarkan bahwa Partai Demokrat di kota Malang adalah partai pemenang pemilu legislatif 2009. Partai ini sangat mengesankan – partai yang di didirikan oleh SBY ini memperoleh suara terbanyak di kota Malang. Partai Demokrat memenangkan pemilihan di tiga daerah pemilihan yakni : Lowokwaru mendapat 17.355 suara. Klojen mendapat 14.464 suara, Blimbing mendapat 24.832 suara. Sementara di dua DP Sukun mendapat 17.248 suara dan DP Kedungkandang mendapat 15.151 suara Partai Demokrat kalah tipis dengan suara PDIP. Secara akumulatif perolehan suara Partai Demokrat di kota Malang sebesar 89.050 suara.

Pertanyaannya kemudian, mengapa partai demokrat bisa memenangkan pemilihan di kota Malang, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan disimpulkan bahwa : (1). Partai Demokrat, dengan jeli memanfaatkan kerumitan sistem pemilihan – karena itu mereka mengintruksikan kepada pemilihnya agar memilih gambar partai tidak perlu memilih calon karena

terlalu rumit. (2). Meski kinerja partai demokrat di kota Malang tidak terlalu baik namun pamor SBY sebagai *icon* Partai Demokrat sangat menopang dulang suara partai demokrat di kota Malang. (3). Akibat marketing politik "*lanjutkan*" dan politik tebar pesona SBY, di kota Malang partai ini mampu menyedot suara pemilih partai-partai yang lain.

PDIP yang pada pemilu tahun 1999 dan pemilu legislatif tahun 2004 memenangkan pemilu dengan suara paling banyak pada pemilu kali ini di kota Malang harus mengakui keunggulan partai demokrat. PDIP kota Malang pada pemilu kali ini hanya menang tipis di banding partai demokrat di dua Daerah Pemilihan : Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang. Di Sukun memperoleh 18.762 suara dan di Kedungkandang mendapat 15.985 suara. Sementara di tiga DP : Lowokwaru, Klojen dan Blimbing harus mengakui keunggulan Partai Demokrat, masing-masing DP mendapat suara : 17.355, 14.464, 24.832. Secara akumulatif perolehan suara PDIP di kota Malang mendapat 65.385 suara.

PKB yang pada pemilu tahun 1999 dan Pileg tahun 2004 berada di urutan kedua, pada pemilu kali ini harus puas di urutan ketiga dengan pengurangan suara yang banyak dan kehilangan 3 kursi. Di DP Sukun PKB mendapat 8.081 suara, di DP Lowokwaru mendapat 3.309 suara, di DP Klojen mendapat 5.499 suara, di DP Blimbing mendapat 6.772 suara, dan di DP Kedungkandang mendapat 11.880 suara. Perolehan suara di Kedungkandang inilah yang bermasalah, menurut klaim PKB harusnya yang mendapat kursi sisa adalah PKB sementara penetapan KPUD kota Malang sisa suara untuk mendapat kursi adalah jatah PAN. Akhirnya PKB dengan terpaksa harus turut keputusan MK yang memutuskan bahwa jatah kursi dari sisa suara adalah milik PAN. Secara akumulatif perolehan suara PKB di kota Malang sebesar 35.531.

Pertanyaannya, mengapa suara PKB secara kumulatif di kota Malang turun sangat banyak sementara untuk jatah kursi kehilangan 3 kursi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan disimpulkan bahwa :

(1). Pemilih PKB pada umumnya adalah pemilih tradisional dan pemilih primordial saat itu sedang mengalami *split personality*, akibat pertikaian elite

primordialnya. Gusdur sebagai elite primordial menyerukan umatnya untuk Golput dan jangan memilih PKB. Khoirul Anam yang pernah menjadi petinggi PKB Jawa Timur ditopang oleh *Kyai Langitan* mendirikan PKNU, sementara performa PKB Muhaimin kurang menarik secara psikologis maupun ideologis bagi pemilih PKB - karena itu pemilih PKB di kota Malang cenderung pragmatis – *milih sak karepe dewe*. (2). Meski caleg-caleg yang diturunkan PKB di kota Malang seperti Arief Wahyudi dan Fathol Arifin serta di Malang Raya untuk DPRD Jatim dan DPR adalah nama-nama *beken* seperti Muhaimin, Ali Maschan Moesa, namun pemilih PKB cenderung mengikuti himbauan Gusdur. (3). Pemilih PKB di kota Malang nampaknya mulai rasional tidak primordial karena itu mereka mulai kurang terikat secara primordial kepada pemimpin primordial, bisa jadi pemilih PKB adalah pemilih yang mulai mandiri kurang terikat dengan elite primordial dalam memilih partai atau caleg.

PKS di kota Malang, setelah kurang mengesankan dalam pemilu 1999 karena perolehan suaranya berkisar hanya 3500-an dan mendapat 1 kursi, pada pemilu 2004 terjadi lonjakan yang luar biasa karena mendapat suara sekitar 31.000-an dan mendapat 5 kursi. Pada pemilu legislatif tahun 2009 ini di kota Malang suara PKS secara akumulatif stagnan dan cenderung turun hingga tinggal hanya 25.646 suara namun tetap mendapat jatah 5 kursi. Sebaran suara PKS di DP Sukun mendapat 5.323 suara, di DP Lowokwaru mendapat 6.201 suara, di DP Klojen mendapat 3.312 suara, di DP Blimbing mendapat 5.231 suara, dan di Kedungkandang mendapat 5.579 suara.

Gerak PKS di kota Malang selama lima tahun diidentifikasi sebagai berikut : (1). dengan perkaderan yang menerapkan ideologi tarbiyah dan *halaqoh* banyak menarik minat kalangan muda Islam perkotaan dan kalangan muda muslim yang berasal dari kampus. (2). Memiliki tenaga muda yang militan mereka juga berusaha menarik massa yang berasal dari kalangan bawah. Dengan *motto* peduli mereka melakukan santunan, pengobatan massal, beasiswa, dan pemberian zakat. (3). Kemampuan meredam konflik, hampir tak terdengar selama lima tahun ini PKS mengalami konflik, mereka memperlihatkan organisasi partai yang efektif mampu menggerakkan elemen-elemen partai tanpa

dihantui oleh konflik sebagai bawaan dari partai politik. (4). Di berbagai *event* PKS kota Malang selalu melakukan publikasi, sebar famlet, pasang bendera, pasang spanduk dan baliho untuk melakukan sosialisasi berbagai aktivitas partai. (5). Mengikuti pilkada tahun 2008 dengan mengusung calon walikota sendiri "Subhan", berkoalisi dengan partai-partai non parlemen dan PPP dengan maksud agar calon PKS dapat menduduki kursi walikota meski kemudian gagal. Namun keikutsertaannya dalam pilkada juga digunakan untuk "tujuan antara" yakni mengukur tingkat besaran konstituen PKS kota Malang dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009.

Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan PKS selama lima tahun pada periode 2004-2009 nampaknya berhasil namun seperti yang kita lihat data hasil pemilu 2009, konstituen PKS cenderung stagnan bahkan menurun hal ini disebabkan karena melubernya konstituen ke Partai Demokrat juga timbulnya partai baru yang cenderung menarik perhatian masyarakat kota Malang seperti Gerindra dan Partai Hanura. Menurut informan yang kebetulan pengurus DPD PKS kota Malang, selama lima tahun ini PKS telah bekerja keras memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk *ngrumat* konstituen namun hasilnya kurang menggembirakan : "kerja keras kami selama lima tahun ternyata dikalahkan oleh marketing politik yang jitu dari partai demokrat" demikian komentar salah seorang Pengurus DPD PKS kota Malang. Komunikasi pribadi peneliti (30 Mei 2010) di Gedung DPRD dengan salah seorang anggota DPRD kota Malang dari Fraksi PKS, ia mengatakan : "suara PKS tahun 2009 di kota Malang memang turun sekitar 5.000-an, namun dilihat dari prosentase suara PKS naik di semua daerah pemilihan". Peneliti juga menanyakan potensi PKS mengalahkan Partai Demokrat di kota Malang : "Partai demokrat memiliki sarana prasarana yang lengkap – disamping itu kemenangannya juga ditopang oleh operasi intelejen".

Partai Golkar kota Malang, Partai yang dipimpin oleh Aries Pujanggoro (almarhum) ini selama tiga kali pemilu selalu turun peringkat, jika pemilu tahun 1999 di peringkat ketiga dengan perolehan 63.362 suara dan 7 kursi, pada pemilu tahun 2004 berada di peringkat 4 dengan perolehan 52.668 suara dan perolehan 6 kursi. Pada pemilu kali ini peringkat Golkar turun diurutan ke lima dengan

perolehan suara secara kumulatif 24.349 suara dan mendapat kursi lima. Sebaran perolehan suara sebagai berikut : Di daerah pemilihan sukun mendapat 9063 suara, di daerah pemilihan Kedungkandang memperoleh 4625 suara, di daerah pemilihan Lowokwaru memperoleh 3.091 suara, di daerah pemilihan Klojen memperoleh 2.683 suara, di daerah pemilihan Blimbing memperoleh 4887 suara.

Bagi Golkar persoalan yang timbul dalam pemilihan kali ini diidentifikasi sebagai berikut; (1). Hanya di daerah pemilihan Sukun suara Golkar bertahan mencapai BPP, sementara di DP lainnya perolehan kursi diperoleh berdasarkan sisa suara. (2). Dengan suara yang minim hampir saja di daerah pemilihan Lowokwaru Golkar tidak mendapat kursi. (3). Meski pada Pilkada tahun 2008 Golkar ikut pemilihan dengan mencalonkan ketuanya yang berkoalisi dengan ketua PAN sebagai calon walikota/cawawali, dengan harapan dapat memenangkan pemilihan dan meningkatkan suara partai, namun seperti yang kita ketahui pilkada gagal dan pada pemilu 2009 suara Golkar cenderung turun.

PAN kota Malang, partai yang dipimpin oleh Mohan Ketelu ini selama tiga kali pemilu selalu turun peringkat, jika pemilu tahun 1999 di peringkat keempat dengan perolehan 41.000-an suara dan 4 kursi, pada pemilu tahun 2004 berada di peringkat 6 dengan perolehan 28.000-an suara dan perolehan 5 kursi. Pada pemilu kali ini peringkat PAN tetap diurutan ke enam dengan perolehan suara secara kumulatif 16.844 suara dan mendapat 4 kursi. Sebaran perolehan suara sebagai berikut : Di daerah pemilihan sukun mendapat 2.067 suara, di daerah pemilihan Kedungkandang memperoleh 3.396 suara, di daerah pemilihan Lowokwaru memperoleh 4.394 suara, di daerah pemilihan Klojen memperoleh 3431 suara, dan di daerah pemilihan Blimbing memperoleh 3.556 suara.

Bagi PAN persoalan yang timbul dalam pemilihan kali diidentifikasi sebagai berikut : (1). Di empat daerah pemilihan suara PAN tidak mencapai BPP, karena itu perolehan kursi PAN berdasarkan suara sisa. (2). Di daerah pemilihan Sukun untuk mendapat kursi dengan suara sisa, suara PAN masih kalah dengan perolehan suara PDS – karena itu didaerah ini PAN kehilangan kursi. (3). Pemilih PAN didaerah ini banyak yang beralih ke Partai Matahari Bangsa. (4). Meski pada Pilkada tahun 2008 PAN ikut pemilihan dengan

mencalonkan ketuanya yang berkoalisi dengan ketua Golkar sebagai calon wali kota dan calon wawali, dengan harapan dapat memenangkan pemilihan dan meningkatkan suara partai, namun seperti yang kita ketahui dalam pilkada PAN gagal dan pada pemilu 2009 suara PAN turun.

3. Aspirasi memilih Anggota Legislatif : Wakil Partai Demokrat Bertambah - Wakil Partai lain Berkurang atau Stagnan.

Kalau diamati secara seksama konfigurasi politik di parlemen lokal kota Malang pasca pemilu legislatif tahun 2009 sangat menarik. Menarik karena terjadi perubahan-perubahan yang mendasar di tinjau dari segi peta kekuatan politik yang mendominasi Gedung tugu. PDI-P yang dua kali pemilu unggul dalam jumlah dan duduk dalam struktur utama (Ketua DPRD) parlemen, untuk pemilu kali ini mereka harus merelakan dominasinya kepada partai demokrat dan menyerahkan pimpinan parlemen kepada “partai SBY” tersebut. PKS stagnan sementara partai-partai lain seperti PKB, Golkar, PAN mengalami penurunan jumlah anggota DPRD. Partai debutan baru seperti Gerindra dan Hanura mendapat tempat dihati pemilih dikota Malang namun masing-masing hanya mendapat bagian dua dan satu perwakilan. Lebih detail tentang konfigurasi keterwakilan partai di lembaga legislatif seperti tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Keterwakilan Partai di DPRD kota Malang Hasil Pileg 2009

Partai	Sukun	Kedung Kandang	Lowok waru	Klojen	Blimbing	Jumlah
Partai Demokrat	2	2	3	2	3	12
PDIP	2	2	2	1	2	9
PKB	1	1	1	1	1	5
Golkar	1	1	1	1	1	5
PKS	1	1	1	1	1	5
PAN	-	1	1	1	1	4
GERINDRA	1	1	-	-	-	2
PDS	1	-	-	-	-	1
PKPB	-	-	1	-	-	1
Hanura	1	-	-	-	-	1
Jumlah	10	9	10	7	9	45

Sumber : Data skunder diolah dari KPUD kota Malang

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2009 di Kota Malang seperti yang di umumkan oleh KPUD kota Malang terjadi perubahan-perubahan cukup *signifikans* yang diidentifikasi sebagai berikut : (1). Partai demokrat mendapat 89.050 suara dan 12 orang wakil rakyat, anggota parlemen Partai Demokrat ini meningkat 5 orang dibanding hasil pemilu 2004 dan tambahan ini merata di semua daerah pemilihan. (2). PDIP mendapat 65.385 suara dan 9 wakil rakyat, jumlah anggota DPRD dari PDIP ini turun 3 dibanding pemilu 2004 yang pada saat itu partai moncong putih mendapat 12 anggota parlemen. (3). PKB mendapat 35.531 suara dan 5 orang anggota DPRD, wakil PKB berkurang 3 orang dibanding hasil pemilu 2004. (4). Partai Golkar mendapat 24.349 suara dan 5 orang wakil rakyat, dan jumlah anggota DPRD ini berkurang 1 dibanding hasil pemilu 2004. (5). PKS mendapat 25.646 suara dan 5 orang wakil rakyat, pada pemilu kali ini meski suara PKS turun namun jumlah anggota DPRD di parlemen lokal tetap 5 orang. (6). PAN memperoleh 16.844 suara dan 4 wakil rakyat, pada pemilu 2009 suara PAN turun drastis jumlah anggota DPRD hilang 1 di DP Sukun; (7). Partai debutan baru yang mendapat tempat di hati pemilih kota Malang adalah Hanura dengan mendapat 10.102 suara dan 1 wakil, Gerindra mendapat 14.267 suara dan 2 wakil, (8). Partai lama seperti PDS mendapat 10.363 suara dan 1 wakil, jumlah akumulasi suara turun jumlah anggota parlemen berkurang 1 orang. PKPB mendapat 7.756 suara dan 1 Wakil. Disamping itu juga ada 34 partai yang mengikuti pemilu dikota Malang namun perolehan suaranya tidak signifikan untuk mendapatkan jatah kursi sehingga tidak mendapatkan wakil di parlemen lokal Malang.

Yang perlu digaris bawahi dari uraian diatas adalah : (1). Perolehan suara partai tersebut diatas juga menunjukkan kadar keterwakilan (Pipit : 2003) partai di parlemen lokal. (2). Semakin besar kadar keterwakilan partai di parlemen kota Malang semakin besar kemungkinan untuk menduduki jabatan strategis di DPRD seperti : Ketua DPRD, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan lain-lain. (3). Semakin besar kadar keterwakilan di lembaga legislatif semakin besar kemungkinan mendektekan kebijakan-daerah. (4). Yang pasti, partai dengan memiliki kadar keterwakilan yang besar - bisa mengusung sendiri calon wali kota/Wawali.

Adapun nama anggota DPRD kota Malang periode 2009 – 2014 hasil pemilu legislatif tahun 2009 sebagai berikut :

Tabel 4
Anggota DPRD Kota Malang Periode 2009 – 2014

No	Nama	Asal Partai / Jumlah	Daerah Pemilihan
1	Ir. Arif Darmawan, Adi Sancoko Ir. Indra Tjahjono Suharni, SH Hery Subiantono Dra. Fransiska Rahayu Budiwarti Suyatno Suprasnowo Moenadjam Sulik Listyowati,SH Christea Frisdiantara, SE, MM Wiwik Hendri Astuti Mudjiono, SH	Partai Demokrat 12 orang	Lowokwaru Lowokwaru Lowokwaru Klojen Klojen Blimbing Blimbing Blimbing Sukun Sukun Kedungkandang Kedungkandang
2	Drs. Ec RB Priyatmoko Oetomo, SH, MM, Map M. Arief Wicaksono, ST Dra. Sri Untari Drs. Abd. Hakim Tri Yudianti Drs. Eka Satria Gautama, MH Nindya Dwi Kirana Drs. Nuruddin Huda Suprpto, SH	PDIP 9orang	Lowokwaru Lowokwaru Klojen Blimbing Blimbing Sukun Sukun Kedungkandang Kedungkandang
3	Drs. Sutiaji Arief Wahyudi, SH Rasmuji Siswo Waroso, SE Abd. Rakhman	PKB 5 orang	Lowokwaru Klojen Blimbing Sukun Kedungkandang
4	Bambang Triyoso, SE MM Ahmadi, S.Si Choirul Amri, SE Nurul Arba'ati, SPt Muhammad Isa Anshori	PKS 5 orang	Lowokwaru Klojen Blimbing Sukun Kedungkandang
5	Dra Maimunah Sam'un SH, Mag Rahayu Sugiarti, S.Sos Prof. DR. Bambang Satriya, SH, MH Ir. Sofyan Edi Jarwoko Healthy Lukistiono, SE, MSi	Partai Golkar 5 orang	Lowokwaru Klojen Blimbing Sukun Kedungkandang
6	Pujianto, SE, MH Saiful Rusdi, MPd Loch Mahfud Subur Triono, SE	PAN 4 orang	Lowokwaru Klojen Kedungkandang Blimbing
7	RM Een Ambarsari, Dra Drs. Salamet	Gerindra 2 orang	Sukun Kedungkandang
8	Budiyanto Wijaya, SH	PDS/ 1 orang	Sukun
9	Ya'qud Ananda Gudban, SS, SST, MM	Hanura/ 1 orang	Sukun
10	Agus Suryanto	PKPB/ 1 orang	Lowokwaru

Sumber : Data skunder KPUD Kota Malang

Dari data anggota DPRD kota Malang periode 2009/2014 dapat di konklusikan sebagai berikut : (1). Kurang lebih 70% anggota DPRD adalah wajah baru hal ini sangat menguntungkan institusi karena mereka tidak terimbas oleh beban politis, relasi politik yang masif dan administratif anggota DPRD periode sebelumnya. Kelemahannya mereka harus cepat segera beradaptasi dengan suasana kedewanan dan pemerintahan kota Malang. (2). Aspek pendidikan anggota DPRD kota Malang, terjadi peningkatan dibanding tingkat pendidikan anggota parlemen sebelumnya. Hal ini penting karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan para anggota Dewan lebih mampu memahami karakteristik, kondisi psikologis, realitas hidup masyarakat kota Malang. (3). Karena sistem pemilihan legislatif tahun 2009 adalah sistem proporsional terbuka dengan daftar terbuka dengan calon jadi berdasarkan suara terbanyak maka dengan ini dimungkinkan terjadi kedekatan secara psikologis antara wakil rakyat dengan konstituen. Kedekatan jarak psikologis antara anggota dewan dengan konstituen pemilihnya memungkinkan bertemunya kebijakan yang dibuat dewan bersama pemerintah lokal dengan aspirasi yang di inginkan oleh masyarakat kota Malang.

4. Aspirasi memilih Presiden Dan Wakil Presiden : Daya Pikat SBY-Budiono Lebih Besar Dibanding Yang Lain.

Sebelum menguraikan sebaran aspirasi masyarakat kota Malang dalam memilih presiden dan wakil presiden, terlebih dahulu dipaparkan peta pemilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut : (1). Jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPUD kota Malang sebesar 590.0032 orang. (2). Pemilih yang menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan calon wakil presiden sebesar 430.769 orang (73,01%) sementara yang tidak menggunakan hak pilih (golput) sebesar 159.263 orang (26,99%). (3). Tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih presiden dan wakil presiden di semua DP dikategorikan cukup tinggi karena berada dikisaran interval antara 65% s/d 76%. (4). Tingkat partisipasi masyarakat tertinggi berada di kecamatan sukun (75,72%) dan terendah berada di kecamatan Klojen (68,34%). Sebaliknya, angka golput yang terbanyak berada di kecamatan Klojen (31,66%) dan angka golput

terendah berada di kecamatan Sukun (24,28%). (5). Secara akumulatif tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih presiden dan wakil presiden di kota Malang sebesar (73,01%), sementara angka golput mencapai 26,99%. Secara detail identifikasi pemilih tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 5
Identifikasi Pemilih Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kota Malang

Kecamatan	Pemilih berdasar DPT	Pemilih Menggunakan Hak Pilih	Pemilih Tak menggunakan Hak pilih	Prosentase Menggunakan Hak pilih	Prosentase tak menggunakan hak pilih
Kedungkandang	127.806	91995	35.811	71,98%	28,02%
Sukun	134.390	101.765	32.625	75,72%	24,28%
Klojen	86.736	59.273	27.463	68,34%	31,66%
Blimbing	129.734	95.083	34.651	73,29%	26,71%
Lowokwaru	111.366	82.653	28.713	74,22%	25,78%
Jumlah	590.032	430.769	159.263	73,01%	26,99%

Sumber : Data skunder yang diolah

Sebaran aspirasi masyarakat memilih presiden dan wakil presiden di Kota Malang – terakumulasi dalam perolehan suara calon presiden dan wakil presiden sebagai berikut : (1). Megawati – Prabowo memperoleh suara 107.319 (25,96%); SBY- Budiono memperoleh suara sebesar 273.412 (66,13%), dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto memperoleh suara sebesar 32.697 (7,91%). (2). Pasangan SBY-Budiono memenangkan pemilihan di semua DP kota Malang dengan prosentase sangat meyakinkan sebesar diatas 60%, dengan rincian sebagai berikut : DP Kedungkandang 61,58%; DP Sukun 62,64%; DP Klojen 69,84%; DP Lowokwaru 67,97% dan DP Blimbing sebesar 70,04%. (3). Sebagai daerah basis PDIP Kota Malang – terjadi perubahan konfigurasi - jika pada pilpres tahun 2004 masih menyisakan dua daerah pemilihan dan pileg 2009 menyisakan dua daerah pemilihan yang menang untuk Megawati dan PDIP, kali ini dalam pilpres 2009 kota ini semakin tergerogoti oleh kekuatan SBY-Partai Demokrat - karena dalam realitasnya tidak menyisakan kemenangan sama sekali. Lebih lanjut tentang sebaran pemilih di Kota Malang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6
Sebaran Suara pemilih
Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kota Malang

Kecamatan	Megawati Prabowo	SBY Budiono	Jusuf Kala Wiranto	Jumlah Mengguna kan Hak pilih	Pemilih berdasar DPT	Prosentase mengguna kan hak pilih
Kedungkandang	26.308	53.966	7.358	87.632	127.806	68,56%
Sukun	30.003	61.224	6.163	97.390	134.390	72,47%
Klojen	12.020	40.047	5.274	57.341	86.736	66,11%
Blimbing	20.927	63.918	6.404	91.249	129.734	70,33%
Lowokwaru	18.061	54.257	7.498	79.816	111.366	71,67%
Jumlah	107.319	273.412	32.697	413.428	590.032	69,83%

Sumber : data skunder KPUD Kota Malang yang diolah

B. Perubahan Perubahan Aspirasi Masyarakat Kota Malang Dalam Pemilu

1. Fluktuasi Aspirasi Pemilih : Di Kota Malang Tak selamanya PDI-P Dominan

Dinamika politik masyarakat kota Malang dalam pemilu sangat dinamis, hal ini dapat diketahui dari hasil pemilu tahun 1999, tahun 2004, dan 2009. Tiga kali pemilu zaman reformasi ini aspirasi masyarakat kota Malang dalam memilih partai politik, calon legislatif dan pemimpin politik mengalami fluktuasi. Tahun 1999 partai politik dan kekuatan politik yang menjadi kanal aspirasi masyarakat kota Malang adalah : (1). PDIP mendapat suara 162.818 dan 18 kursi; (2). PKB mendapat suara 77.429 dan 8 kursi; (3). Golkar mendapat suara 63.362 dan 6; (4). PAN mendapat 41.582 suara dan 5 kursi (5). PPP mendapat 11.080 suara dan 1 kursi; (6). PBB mendapat 9.518 suara dan 1 kursi; (7). PKP mendapat 5.608 suara dan 1 kursi; (8). PK mendapat 3157 suara dan 1 kursi (9). TNI/POLRI atas dasar Undang-undang mendapat jatah 5 kursi. Sementara 40 dari 48 partai politik peserta pemilu 1999 di kota Malang, meski mendapat suara namun suaranya tidak cukup signifikan untuk mendapat jatah kursi di parlemen lokal.

Lima tahun kemudian pada pemilu legislatif tahun 2004 aspirasi masyarakat kota Malang dalam memilih partai politik dan mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini bisa diketahui dari perolehan suara masing

partai yang mengikuti pemilu di Kota Malang. Dari 24 partai politik yang memenuhi syarat mengikuti pemilu tahun 2004 secara nasional, di kota Malang semua partai tersebut juga memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu legislatif. Hasil akhir perhitungan untuk DPRD Kota Malang mulai urutan yang terbanyak partai mendapat suara : PDIP memperoleh 110.172 suara, PKB 74.475 suara, Partai Demokrat 61.757 suara, Partai Golkar 52.668 suara, PKS 30482 suara, PAN 28357 suara. PDS 17.722 suara dan PPP 9.909 suara. Disamping itu juga ada 15 partai yang mengikuti pemilu dikota Malang namun perolehan suaranya tidak signifikan karena tidak mendapatkan kursi di parlemen lokal Malang. Sembilan partai yang peneliti sebutkan diatas adalah partai yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan, disamping itu juga merupakan partai yang memperoleh kursi di DPRD Kota Malang tahun 2004, masing-masing partai dan perolehan kursi sebagai berikut : PDIP 12 kursi, PKB 8 kursi, Partai Demokrat 7 Kursi, Partai Golkar 5 Kursi, PKS 5 Kursi, PAN 5 Kursi, PDS 2 kursi dan PPP 1 kursi jumlah total kursi untuk anggota DPRD kota Malang 45 kursi.

Pada Pemilihan legislatif tahun 2009 aspirasi masyarakat Kota Malang dalam memilih partai dan mengalami perubahan cukup signifikans yang diidentifikasi sebagai berikut : Partai demokrat mendapat 89.050 suara dan 12 kursi, PDIP mendapat 65.385 suara dan 9 kursi, PKB mendapat 35.531 suara dan 5 kursi, Partai Golkar mendapat 24349 suara 5 Kursi, PKS mendapat 25646 suara dan 5 Kursi, PAN 16844 suara dan 4 Kursi, Hanura mendapat 10102 suara dan 1 kursi, Gerindra mendapat 14267 suara dan 2 kursi , PDS 10363 suara dan 1 kursi, PKPB mendapat 7.756 suara dan 1 kursi. Disamping itu juga ada 34 partai yang mengikuti pemilu dikota Malang namun perolehan suaranya tidak signifikan sehingga tidak mendapatkan kursi di parlemen lokal Malang.

Apa yang bisa kita pelajari dari fluktuasi partai diatas adalah : *Pertama*, kepercayaan pemilih makin lama semakin memudar kepada partai-partai seperti : PDI-P, PKB, Golkar dan PAN dan beberapa partai lain yang kehilangan kursi; *Kedua*, Kepercayaan pemilih semakin besar kepada partai seperti Partai Demokrat mungkin juga PKS; *Ketiga*, Ada harapan baru partai yang mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat kota Malang seperti Partai Gerindra dan Hanura.

Lebih detail tentang fluktuasi aspirasi masyarakat kota Malang dalam memilih partai berikut ini :

Tabel 7

Aspirasi dan Perubahan aspirasi Masyarakat Kota Malang dalam Memilih Partai Pada Pemilu 1999, Pileg 2004 dan Pileg 2009					
Nama partai/ Kekuatan Politik	Perolehan Suara Partai / Kursi			Peningkatan & penurunan suara Partai	Peningkatan & penurunan suara Partai
	1999	2004	2009	2004	2009
PDI Perjuangan	162.818 (18)	110.172 (12)	65.385 (9)	(-) 52.646	(-) 44.787
PKB	77.429 (8)	74.475 (8)	35.531 (5)	(-) 2.954	(-) 38.944
Partai Golkar	63.362 (6)	52.668 (5)	24.349 (5)	(-) 10.694	(-) 28.319
PAN	41.582 (4)	28.375 (5)	16.844 (4)	(-) 13.107	(-) 11.531
PK(S)	3.157 (1)	30.482 (5)	25.646 (5)	(+) 27.325	(-) 4.836
PKP(I)	5.608 (1)				-
PBB	9.518 (1)				-
PPP	11.080 (1)	9.909 (1)		(-) 1.171	-
TNI/Polri	Jatah Kursi (5)				
Partai Demokrat	-	61.757 (7)	89.050 (12)	-	(+) 27.293
PDS	-	17.722 (2)	10.363 (1)	-	(-) 7.359
Partai Hanura			10.102 (1)		
Gerindra			14.267 (2)		
PKPB			7.756 (1)		
simpulan	Dari 24 partai dan satu kekuatan politik hanya 9 yang memperoleh kursi	Dari 48 partai peserta pileg hanya 8 partai yang mendapat kursi	Dari 38 partai peserta pileg hanya 10 partai yang mendapat kursi	Semua partai dapat kursi thn 1999 thn 2004 alami penurunan suara kecuali PKS, PBB, PKPI hilang kursi	partai dapat kursi thn 2004 thn 2009 alami turun suara kecuali demokrat, Hanura, Gerindra Partai baru

Sumber : Data skunder yang diolah

2. Perubahan Aspirasi : Pemilih Kota Malang Rasional Pragmatis - Berubah Partai Tidak Tabu.

Berikut ini mengurai tentang peta psikologis – pemilih partai di kota Malang. Terdapat tiga kerangka teoritik yang digunakan menjelaskan fenomena ini : Pertama, untuk mengetahui keratan hubungan antara partai dengan pemilih

nya digunakan acuan Saiful Mujani (2005) tentang hubungan pemilih dengan pemilih : Loyal, terasing, bersekutu dan pragmatis; Kedua, untuk mengetahui mengapa pemilih berubah dari partai satu kepartai lain - dari pemilu ke pemilu menggunakan kerangka acuan Zagler tentang Volatilitas; Ketiga, mengetahui – renggang memudar atau tetap setia pemilih kepada partai menggunakan teori loyalitas Geertz tentang : loyalitas politik, loyalitas primordial dan loyalitas politik yang fanatik. Berikut ini uraian peta psikologis pemilih enam partai pemenang pemilu legislatif tahun 2009.

a. Peta Psikologis Pemilih PDIP : Memudar Ikatan Primordial – Beranjak ke Pragmatis

Di kota Malang, selama ini pemilih PDIP diidentifikasi sebagai pemilih yang memiliki loyalitas primordial, karakteristik loyalitas primordial adalah : (a). kesetiaan yang bersifat alami dan sangat kuat sehingga tidak mudah tergoyahkan bahkan mungkin oleh apapun (b). Pemilih PDIP memiliki fanatisme dan solidaritas yang tinggi karena itu setiap anggota PDIP mempunyai kecenderungan tinggi untuk membela mati-matian : nilai-nilai seperti Soekarnoisme Marhaenisme – NKRI Harga Mati, membela pemimpin mereka yang kharismatik (Megawati) (c). dukungan didasarkan pertimbangan emosional dan perasaan, dalam kesetiaan seperti ini dukungan kepada Megawati, anggota kelompok dan nilai-nilai kelompok tidak didasarkan pertimbangan rasional tapi lebih pada pertimbangan emosional dan perasaan (d). pemilih ini memiliki ketergantungan terhadap elit primordial seperti Megawati, sikap politik para pemilih yang memiliki loyalitas primordial relatif tergantung kepada elit primordial, mereka para loyalis primordial itu cenderung “kurang mandiri” kalau tidak mau dikatakan “tidak mandiri” dalam menentukan sikap politik.

Dalam relasi pemilih dan partai, terjadi hubungan yang “*loyal*”, dalam tipe hubungan seperti ini antara PDIP dan pemilihnya terjadi hal-hal sebagai berikut : (a). Hubungan antara PDIP dan massa pemilih PDIP hanya bersandar pada hubungan emosional. Dimensi rasionalitas atau intermediasi-nya lemah atau tidak ada. (b). Kemungkinan akan membantu stabilitas dukungan pada PDIP meskipun partai tidak berfungsi bagi kepentingan pemilih. (c). Dalam tipe ini elite partai

seperti Megawati (Ketua Umum DPP PDIP), Peni Soeprato (Ketua Umum DPC PDIP kota Malang) punya pengaruh sangat kuat tanpa kontrol berarti dari pemilih.

Namun seperti yang terbukti dalam tiga kali pemilu di kota Malang, meski PDIP ditengarai memiliki pemilih yang tradisional dan primordial, ternyata faktor ideologis dan primordialisme belum cukup untuk mempertahankan loyalitas pemilih PDIP. Bahkan berdasarkan tabel dibawah ini (Tabel 5) kelihatannya loyalitas pemilih PDIP yang didasarkan faktor ideologis dan primordialisme mulai memudar dan digantikan oleh sikap pragmatisme, sehingga pada pemilu legislatif tahun 2009 ini tingkat loyalitas pemilih PDIP turun dari sebesar 0,67% tahun 2004 - pada pemilu sekarang tingkat loyalitas pemilih PDIP turun menjadi sebesar 0,59%. Dengan demikian banyak pemilih PDIP sekitar 41% beralih ke partai lain seperti Partai Demokrat, Hanura dan Gerindra. Lebih jelas tentang perubahan dari pemilih tradisional dan primordial beralih ke pemilih yang pragmatis dapat disimak dalam tabel berikut :

Tabel 8
Volatilitas dan Kesetiaan Pemilih PDIP
Di Kota Malang Dalam Tiga Kali Pemilu

Pemilu	Jumlah suara	Volatilitas	Tingkat Loyalitas	Jumlah kursi
1999	162.818		-	17
2004	110.172	(-) 52.646	0,67	12
2009	65.385	(-) 44.787	0,59	9

Sumber : Data skunder yang diolah

b. Peta Psikologis Pemilih PKB : Ikatan Primordial tradisional beralih ke Rasional Pragmatis

“Loyalitas Tanpa Batas”, demikianlah bunyi jargon di baliho dan spanduk Arief Wahyudi seorang calon legislatif PKB di kota Malang pada masa kampanye tahun 2009. Sayangnya di baliho tersebut tidak dijelaskan loyal kepada siapa Arief Wahyudi : loyal kepada PKB, loyal kepada Muhaimin Iskandar bos PKB, loyal kepada Gusdur-pendiri PKB, atau loyal kepada konstituennya di kota Malang. Bahkan mungkin sebaliknya dengan jargon “Loyalitas Tanpa Batas”,

Arief mengajak konstituennya untuk tetap setia kepada PKB meski PKB diberbagi tingkatan pengurus sedang mengalami konflik yang demikian akut antara kubu Gusdur dan kubu Muhaimin Iskandar.

Meski di Malang pada tahun 2004 tingkat loyalitas pemilih PKB paling baik setelah PKS yakni 0,96%, karena memiliki pemilih tradisional dan memiliki pemilih yang primordial namun pada pemilu 2009 ini tingkat loyalitas PKB mengalami kemerosotan yang sangat tajam hingga hanya tinggal 0,47%. Karena itu himbauan jargon Arief tersebut diatas tidak berarti apa-apa karena suara PKB di Malang mengalami kemerosotan dari sejumlah 74.475 suara tahun 2004 menjadi 35.531 suara pada tahun 2009. Sebagai partai yang memiliki pemilih primordial dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap elit tradisional (Kyai dan ulama) pemilih PKB di kota Malang pada pemilu kali ini kurang memiliki kepatuhan kepada elit primordial buktinya suara PKB merosot hingga sampai 38.944 jika dibanding perolehan suara tahun 2004 dan tahun 2009, dan kemerosotan suara PKB ini masih lebih besar dibanding hasil perolehan suara mereka pada pemilu kali ini yakni 35.531 suara.

Gejala ketidak patuhan kalau tidak mau dikatakan pembangkangan konstituen PKB terhadap elit primordial di kota Malang sudah diketahui sejak pilpres ke I tahun 2004, kesimpulan penelitian kami terdahulu (Jainuri :2005) :

“Ditingkat grass root massa NU dan PKB terjadi “kebingungan politik” dan “dukungan setengah hati” bahkan mungkin juga terjadi semacam “pembangkangan politik” terutama melihat perilaku elit mereka yang antara satu dengan lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang memiliki orientasi dan kecenderungan berbeda dalam pemilihan Presiden putaran I ini. Gusdur secara pribadi “golput” karena tidak lolos dalam pencapresan, sementara sebagai ketua Dewan Syuro PKB, Gusdur menyerahkan sepenuhnya kepada DPP-PKB untuk mengusung atau mendukung calon lain, DPP PKB setelah Gusdur tidak lolos pencapresan, cenderung mendukung Sholahuddin Wahid untuk menjadi Cawapres Golkar yang akhirnya PKB dan Golkar berkoalisi untuk mengusung Wiranto-Sholahuddin Wahid, sementara itu Hasyim Muzadi yang ketua umum PBNU kemudian non aktif bersedia untuk menjadi calon pasangan Megawati. Nuansa perbedaan orientasi politik dilingkungan elit NU dan PKB demikian dapat dirasakan dan dapat dilihat secara transparan di media massa oleh para pemilih terutama warga PKB dan NU dikota Malang, akhirnya terjadi semacam Split

personality secara massal yang dimanifestasikan dalam bentuk “meleh sak karepe dewe” tidak perlu menunggu instruksi dari para elitnya”.

Seperti repetisi pada pilpres 2004, himbauan Gusdur untuk Golput dan tidak memilih Caleg PKB Muhaimin dalam pemilu legislatif 2009 membuahkan hasil - suara PKB di Kota Malang turun drastis, seperti di bawah ini :

Tabel 9
Volatilitas dan Loyalitas Pemilih PKB
Di Kota Malang dalam Tiga Pemilu

Pemilu	Jumlah suara	Volatilitas	Tingkat Loyalitas	Jumlah kursi
1999	77.429		-	8
2004	74.475	(-) 2.954	0,96	8
2009	35.531	(-) 38.944	0,47	5

Sumber : Data Sekunder yang diolah

c. Peta Psikologis Pemilih PKS : Loyal dan Tetap Bersekutu

Menurut hasil penelitian yang diungkap *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) cukup mengejutkan mengingat PKS baru lahir pada era reformasi 1998. Dalam pemilu pertama 1999, PKS yang dulu masih bernama Partai Keadilan (PK) bahkan sempat tidak lolos ET sehingga harus berganti nama menjadi PKS. Menurut CSIS, dari 3.000 responden yang disurvei pada pertengahan Mei 2008 ditemukan fakta bahwa sebanyak 75,4 persen pemilih yang pada pemilu 2004 lalu memilih PKS, menyatakan akan kembali memilih PKS pada Pemilu 2009, Bagaimana dengan pemilih PKS di Kota Malang ?

Pemilih PKS di kota Malang adalah pemilih yang sangat loyal hal ini tercermin dari hasil pemilu tahun 2009 yang mencapai tingkat 0,84%, dibanding partai golkar, PKB, PDIP dan PAN, PKS adalah partai yang beruntung karena memiliki pemilih yang setia. Pada pemilu tahun 1999 PK(S) hanya dipilih oleh 3157 orang saja, namun pada pileg 2004 PKS dipilih oleh 30.482 dan pada pileg tahun 2009 PKS dipilih oleh orang Malang dengan jumlah 25.646 suara. Di situs PKS di kota Malang dalam pemilu tahun 2009 ini mereka ingin meraih konstituen sebesar 78.000-an, yaitu sebanding dengan hasil pilkada tahun 2008

dimana calon yang di usung PKS Subhan memperoleh suara sebanyak itu. Namun obsesi DPD PKS kota Malang ini tidak tercapai malah suara akumulatif ditingkat daerah turun sebesar 4.836 suara, karena itu loyalitas pemilih PKS tahun 2009 ini mencapai tingkat 0,84% hasil dari perbandingan perolehan suara PKS tahun 2009 (25.646) dengan perolehan suara PKS tahun 2004 (30.482).

Hubungan PKS dan pemilihnya di kota Malang terjadi gejala “bersekutu” artinya antara PKS di Malang dengan konstituennya nampaknya terjadi hubungan sekutu (Mujani : 2005). Hubungan bersekutu ini di identifikasi sebagai berikut : (a). Hubungan antara PKS dan massa pemilih memenuhi dua dimensi (afeksi dan rasionalitas): (b). Massa pemilih punya hubungan emosional dengan PKS, dan sekaligus hubungan rasional. (c). Hubungan antara dua belah pihak sangat kuat dan positif. Implikasinya Pemilih menjadi optimis dan PKS menjadi berakar dan karena itu menjadi kuat. (d). Pemilih mengidentifikasi PKS sebagai partai yang bersih, jujur dan peduli mampu memperlihatkan kinerja yang baik, sementara PKS dalam batas-batas tertentu mampu memediasi kepentingan-kepentingan pemilih, karena itu hubungan keduanya sangat kuat. Pemilih merasa aspirasi-aspirasi dan kepentingan-kepentingan merka terwadahi, sementara partai seperti PKS menunjukkan kapasitas menjalankan fungsi-fungsi riil partai politik.

Namun seperti nasib yang sama partai-partai lain di kota Malang, PKS mengalami penurunan tingkat loyalitas dan terjadi volatilitas menurun, sebab partai yang didukung oleh kalangan Muslim menengah perkotaan ini pada pemilu kali ini kehilangan pemilih sebesar 16%. Tentang volatilitas dan loyalitas pemilih PKS selama tiga kali pemilu di kota Malang tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 10
Volatilitas dan Loyalitas Pemilih PK(S)
Di Kota Malang Dalam Tiga Pemilu

Pemilu	Jumlah suara	Volatilitas	Tingkat Loyalitas	Jumlah kursi
1999	3.157		-	1
2004	30.482	(+) 27.325	-	5
2009	25.646	(-) 4.836	0,84	5

Sumber : Data Sekunder yang diolah

d. Peta Psikologis Pemilih Golkar : Dari Pemilih Tradisional Beranjak ke Keterasing dan Pragmatis.

Di kota Malang Golkar memiliki loyalitas pemilih tradisional, tipologi loyalitas pemilih tradisional akan terjaga dan menjadi pendukung setia partai Golkar, tetapi – kalau kondisi politik yang carut-marut akan berimplikasi sangat jauh kepada pemilih Golkar, artinya loyalitas pemilih sulit terjaga, karena sistem politik masih sementara mencari format yang tepat. Dari pemilu 1999 ke pemilu 2004 partai ini memiliki tingkat pemilih loyal sekitar 0,83 namun ditahun 2009 loyalitas pemilih Golkar mengalami penurunan drastis tinggal sekitar 0,46, dengan gejala semacam ini partai Golkar di kota Malang dalam hubungannya dengan pemilih terjadi gejala “*keterasingan*” Gejala ini diidentifikasi sebagai berikut : (a). Baik hubungan emosional maupun rasional antara pemilih dan partai Golkar lemah atau bahkan tidak ada. Partai Golkar adalah sesuatu yang asing bagi massa pemilih Golkar, dan partai Golkar tidak dirasakan gunanya oleh mereka. (b). Tipe hubungan ini paling buruk bagi Golkar dan bagi sistem kepartaian.

Bahkan pada akhir-akhir ini hubungan antara partai Golkar di Malang dengan massa pemilihnya terjadi hubungan *Pragmatis*. Hubungan ini terjadi dalam konteks sebagai berikut : (a). Hubungan antara massa pemilih dan partai Golkar ditandai oleh hadir atau kuatnya fungsi intermediasi partai. Di tingkat pemilih partai dirasakan menjadi penghubung kepentingan mereka dengan keputusan-keputusan politik yang dibuat di DPR/DPRD ataupun eksekutif. (b). Namun demikian, hubungan tersebut tidak disertai loyalitas terhadap Partai Golkar. Mereka mendukung partai Golkar sejauh partai tersebut berfungsi untuk memperantarai kepentingan mereka. Bila kepentingan tersebut tak dimediasi maka pemilih akan meninggalkan partai tersebut. (c). Karena dalam prakteknya tidak mudah peran intermediasi ini dimainkan oleh partai, dan tidak mudah semua kepentingan pemilih diakomodasi, maka pola hubungan pragmatis ini cenderung cair, mudah berubah, dan karena itu tidak mudah bagi stabilnya dukungan terhadap partai Golkar. Berikut perolehan suara partai Golkar dalam 3 kali pemilihan legislatif :

Tabel 11
Volatilitas dan Loyalitas Pemilih Golkar
Di Kota Malang Dalam Tiga Kali Pemilu

Pemilu	Jumlah suara	Volatilitas	Tingkat Loyalitas	Jumlah kursi
1999	63.362	-	-	7
2004	52.668	(-) 10.694	0,83	6
2009	24.349	(-) 28.319	0,46	5

Sumber : Data skunder yang diolah

e. Peta Psikologis Pemilih PAN : Dari Loyal Kearah Keterasingan

Menurut survey pemilih PAN adalah pemilih yang memiliki loyalitas yang rentan-mudah berubah, hasil survey yang dilakukan JURDIL PEMILU 2004 yang merupakan koalisi antara Forum Rektor Indonesia, LP3ES, Yappika dan *National Democratic Institute* (NDI) yang menggambarkan sebagai berikut : “Dari hasil survey diketahui bahwa tingkat loyalitas pemilih PAN hanya sebesar 44%, tingkat loyalitas pemilih Golkar 46%, tingkat loyalitas pemilih PPP 34%, tingkat loyalitas pemilih PDIP 36%, tingkat loyalitas pemilih PK(S) mencapai 56%, tingkat loyalitas pemilih PKB mencapai 54%”. Dengan demikian menurut data diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas pemilih PAN lebih baik dibandingkan loyalitas pemilih PPP dan PDIP tetapi lebih buruk jika dibandingkan loyalitas pemilih Golkar, PKB dan PKS. Dalam penelitian tersebut juga diilustrasikan sebagai berikut : ”jika ada 100 orang memilih PAN pada pemilu 1999, maka pada pemilu 2004 dari 100 orang yang tetap loyal memilih PAN hanya 44 orang, sedang yang lain beralih : 2 orang memilih PPP, 4 orang ke Partai Demokrat, 1 orang memilih PKB, 16 orang ke PKS, 1 orang memilih PDI, 3 orang ke Golkar dan seterusnya”.

Sementara menurut Hasil survei nasional - *Indonesian Research and Development Institute* (IRDI), Survei nasional yang dilaksanakan pada 5-12 Juli 2008 dengan tingkat kepercayaan 95 persen, penelitian itu melibatkan 2.600 responden yang dipilih di 33 provinsi secara proporsional. Seperti yang diberitakan Jawapos tanggal 1 Agustus 2008 bahwa loyalitas pemilih PAN

menurut hasil survey tersebut tinggal 54,2 artinya jika ada seratus orang memilih PAN pada tahun 2004, pada pemilu legislatif 2009 yang tetap loyal memilih PAN hanya tinggal 54 orang sedang yang 46 orang pindah ke partai lain. Meski hasil survey tersebut perlu dikaji lebih mendalam, namun untuk memetakan loyalitas pemilih PAN di kota Malang agaknya lebih mendekati kebenaran, hal ini tercermin dari perbandingan perolehan suara PAN tiga kali pemilu berikut ini :

Tabel 12
Perolehan Suara PAN
Untuk DPRD Kota Malang Pada Pemilu 1999, Pileg 2004 dan Pileg 2009

No	KECAMATAN	SUARA PAN UNTUK DPRD II KOTATAHUN 1999	SUARA PAN UNTUK DPRD KOTA TAHUN 2004	SUARA PAN UNTUK DPRD KOTATAHUN 2009
1	Blimbing	8843	5932	3556
2	Lowokwaru	10159	7156	4394
3	Sukun	6704	4702	2067
4	Klojen	9364	5130	3431
5	Kedungkandang	6512	5437	3396
6	Jumlah	41582	28357	16844

Sumber : KPUD Kota Malang yang diolah

Dari data tersebut diketahui bahwa : (1).pada pemilu tahun 1999 PAN kota Malang mendapat suara sebesar 41.582, pada pemilu tahun 2004 mendapat suara 28.357, turun sekitar 13.225 suara atau 31,63%, ini pertanda bahwa identifikasi individu terhadap PAN dan dinamika DPD PAN menjalankan fungsi-fungsi partai politik (kinerja partai) tidak cukup kongruen sehingga berpengaruh terhadap penurunan loyalitas pemilih PAN, implikasinya pada pemilu 2004 tingkat loyalitas pemilih PAN hanya tinggal 68,37%. (2). Pada pemilu 2009 ini tingkat loyalitas pemilih PAN semakin merosot hanya tinggal 59% hasil perbandingan perolehan suara PAN tahun 2009 sebesar 16844 suara dengan perolehan suara PAN pada tahun 2004 sebesar 28357 suara. (3). Votalitas atau pergeseran aspirasi politik di PAN ini diperkirakan kebanyakan berasal dari pemilih yang memiliki karakteristik loyalitas politik dan loyalitas politik yang fanatik sementara pemilih yang memiliki loyalitas primordial (loyalitas fanatik) tetap memilih PAN dan pemilih ini diperkirakan berasal dari warga Muhammadiyah kota Malang sendiri.

Dengan gejala semacam ini PAN di kota Malang dalam hubungannya dengan pemilih mengalami proses “*keterasingan*” Gejala ini diidentifikasi sebagai berikut : (a). Baik hubungan emosional maupun rasional antara pemilih dan PAN lemah atau bahkan tidak ada. PAN adalah sesuatu yang asing bagi massa pemilih PAN, dan PAN tidak dirasakan gunanya oleh mereka. (b). Tipe hubungan ini paling buruk bagi PAN, bagi sistem kepartaian, dan bagi demokrasi perwakilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris DPD PAN kota Malang Pujianto, peneliti meminta tanggapan tentang loyalitas pemilih partai, menurut Pujianto : “ Loyalitas pemilih PAN tinggal antara sepuluh sampai dupuluh persen hal ini tercermin dari suara PAN yang semakin merosot bahkan di Sukun tidak mendapatkan kursi karena suaranya tidak signifikan untuk mendapat kursi” Tentang volatilitas dan loyalitas pemilih PAN selama tiga kali pemilu dapat didiskripsikan sebagai berikut :

Tabel 13
Volatilitas dan Loyalitas Pemilih PAN
Di Kota Malang Dalam Tiga Kali Pemilu

Pemilu	Jumlah suara	Volatilitas	Tingkat Loyalitas	Jumlah kursi
1999	41.582		-	4
2004	28.375	(-) 13.107	0,68	5
2009	16.844	(-) 11.531	0,59	4

Sumber : Data skunder yang diolah

f. Peta Psikologis Pemilih Partai Demokrat : Loyal Sebab *Magnituted* SBY

Partai demokrat adalah gejala : marketing politik, ketokohan sekaligus juga volatilitas. Maksudnya partai demokrat keunggulannya dan kesuksesannya ditopang dengan menggunakan marketing politik LSI Deni JA, ketokohan SBY menjadi *icon dan Magnituted* pemilih untuk memilih partai demokrat dan sekaligus juga meluber/berpindahnya (volatilitas) pemilih partai lain ke partai ini. Penjelasannya, Berdasarkan hasil survey pemilih partai demokrat adalah partai yang memiliki loyalitas pemilih terendah, seperti berikut ini :

Tabel 14
Hasil survey tentang loyalitas Pemilih

Lembaga	Keterangan	PDIP (%)	Golkar (%)	PKS (%)	PKB (%)	PPP (%)	PAN (%)	Partai Demokrat (%)
IRDI	Survey pada 5-12 Juli 2008 melibatkan 2.600 responden yang dipilih di 33 provinsi secara proporsional diumumkan pada tanggal 31 juli 2008	80,7	79,2	78,2	66,9	66,2	54,2	44,3
CSIS	Survei dilakukan pada 11-17 Mei terhadap 3.000 responden yang tersebar di 13 provinsi diumumkan di Jakarta, Selasa 15/7/2008	55,1	61	75,4	48,	32	31	18,7

. Sumber : Diolah dari berbagai sumber Media

Memperhatikan tabel diatas dapat diketahui bahwa : (1). Survey dua lembaga tersebut menginformasikan kepada kita bahwa Partai Demokrat adalah partai yang memiliki loyalitas pemilih terendah yakni IRDI 44,3% dan CSIS 18,7%. (2). Bisa dipahami jika loyalitas pemilih partai demokrat waktu itu menduduki ranking terbawah, karena tahun 2008 pemerintah SBY *notabene* pendiri Partai Demokrat – membuat kebijakan yang tidak populer di mata masyarakat misalnya kenaikan harga BBM, karena Partai ini juga kena imbasnya sehingga kurang diminati oleh masyarakat dan ditinggalkan oleh pendukungnya.

Atas dasar itulah maka Partai Demokrat berusaha keras untuk melakukan upaya menaikkan citra partai, dengan cara : (1). Memanfaatkan lembaga survey

seperti LSI untuk melakukan survey pemilih dan berusaha menaikkan pesona partai demokrat. (2). Pemerintah SBY membuat kebijakan populis yang memihak kepentingan masyarakat seperti : sertifikasi guru, menaikkan gaji PNS, Asuransi kesehatan gratis, Bantuan Langsung Tunai (BLT). (3). Seperti kritik para oposannya (PDIP) usaha “Tebar Pesona” SBY dalam berbagai kesempatan membawa hasil yang meyakinkan – karena itu citra positif pemerintah SBY meningkat. (4). Selaras dengan meningkatnya citra positif pemerintah SBY - Partai Demokrat juga menerima imbas positif, sehingga dalam waktu lebih kurang setahun Partai Demokrat menjadi partai meyakinkan dalam performa kinerjanya dimata masyarakat – karena itu partai SBY ini menang pileg 2009.

Di Kota Malang partai demokrat kurang menunjukkan kinerja yang baik hal ini ditandai dengan konflik sepanjang tahun 2007/2008, konflik terjadi karena perebutan ketua Umum antara Subur Triono dan Arief Darmawan, karena itu meski di Malang partai demokrat memenangkan pemilu 2009 dengan perolehan suara sebesar 89.050 ini bukan karena Partai Demokrat memiliki kinerja yang baik namun tidak berlebihan jika mereka menang karena luberan suara karena ketokohan SBY melalui marketing politik dengan jargon “*Lanjutkan*” . Dengan marketing politik yang jitu maka banyak pemilih partai lain seperti PDIP, Golkar, PAN, PKB beralih ke partai ini, karena itu di Malang dalam Pemilu 2009 ini Partai Demokrat mendapat peluberan suara sekitar 44% dari pemilih partai lain. Tentang loyalitas dan votalitas pemilih Partai ini diketahui dari tabel berikut ini :

Tabel 15
Volatilitas dan Loyalitas Pemilih Partai Demokrat
Di Kota Malang Dalam Tiga Kali Pemilu

Pemilu	Jumlah suara	Votalitas	Tingkat Loyalitas	Jumlah kursi
1999	-	-	-	-
2004	61.757	-	-	7
2009	89.050	(+) 27.293	-	12

Sumber : Data skunder yang diolah

3. Faktor Yang menentukan Perubahan Partai Pemilih di Kota Malang

Pada pemilu tahun 2009 ini, untuk mengetahui tingkat loyalitas dan volatilitas pemilih partai di kota Malang minimal kita harus mengetahui data hasil pemilu selama dua kali periode. Pemilu selama tiga kali di kota Malang hasil yang diperoleh enam partai pemenang pemilu sebagai berikut :

Tabel 16
Votalitas Masyarakat Kota Malang
Terhadap Partai Politik
dalam Pemilu 1999, Peleg 2004 Dan Pileg 2009

Nama Partai	Perolehan Suara Partai/Kursi			Peningkatan penurunan suara Partai	Tingkat loyalitas	Peningkatan penurunan suara partai	Tingkat loyalitas
	1999	2004	2009	2004	2004	2009	2009
PDI Perjuangan	162.818	110.172	65.385	(-) 52.646	0,67	(-) 44.787	0,59
PKB	77.429	74.475	35.531	(-) 2.954	0,96	(-) 38.944	0,47
Partai Golkar	63.362	52.668	24.349	(-) 10.694	0,83	(-) 28.319	0,46
PAN	41.582	28.375	16.844	(-) 13.107	0,68	(-) 11.531	0,59
PK(S)	3.157	30.482	25.646	(+) 27.325	-	(-) 4.836	0,84
Partai Demokrat	-	61.757	89.050	-	-	(+) 27.293	

Sumber : Data KPUD Kota Malang yang diolah

* Keterangan : tingkat loyalitas pemilih diatas dihasilkan dari perbandingan Jumlah perolehan suara pada pemilu 1999 dan pileg tahun 2004. serta perbandingan hasil pileg 2004 dan hasil pileg 2009.

Dari tabel diatas dapat didiskripsikan sebagai berikut : *Pertama*, Tingkat loyalitas pemilih partai yang paling baik di kota Malang pada pemilu legislatif tahun 2009, secara berurutan adalah : PKS 0,84%, PDIP 0,59%, PAN 0,59%, PKB 0,47%, Golkar 0,46%. *Kedua*, Partai Demokrat meski partai ini yang mampu memenangkan pemilihan legislatif tahun 2009 namun dengan peluberan suara yang demikian besar tingkat loyalitas partai ini tidak bisa diidentifikasi, kecuali dengan survey. *Ketiga*, Dibanding pemilu yang lalu, tingkat loyalitas pemilih partai pada pemilu sekarang lebih buruk hal ini bisa dibuktikan dengan contoh empat partai pemenang pemilu, sebagai berikut : (1). Tingkat Loyalitas pemilih PDIP tahun 2004 sebesar 0,67% pada pemilu tahun 2009 tingkat loyalitas pemilih PDIP turun menjadi sebesar 0,59%; (2). Tingkat Loyalitas PKB tahun 2004 sebesar 0,96 pada pemilu tahun 2009 tingkat loyalitas pemilih PKB

tinggal sebesar 0,47%; (3). Tingkat Loyalitas Golkar tahun 2004 sebesar 0,83% pada pemilu tahun 2009 tingkat loyalitas pemilih Golkar tinggal sebesar 0,46%.; (4). Tingkat Loyalitas PAN tahun 2004 sebesar 0,68% pada pemilu tahun 2009 tingkat loyalitas pemilih PAN tinggal sebesar 0,59%.

Terjadinya volatilitas pemilih di kota Malang disebabkan banyak faktor antara lain : (1). Partai Demokrat meski di Malang kurang memiliki kinerja yang baik namun karena daya pikat SBY dan marketing politik yang dibuatnya jitu maka banyak pemilih partai lain seperti PDIP, Golkar, PAN, PKB beralih ke partai ini, karena itu di Malang dalam Pemilu 2009 ini Partai Demokrat mendapat peluberan suara sekitar 44% dari pemilih partai lain. (2). Pada pemilu 2009 ini, pemilih melihat partai yang dipilihnya dulu tidak lagi sebagai satu-satunya partai yang dapat menyalurkan dan memediasi kepentingan-kepentingan mereka. Karena itu antara pemilih dengan partai tersebut terjadi hubungan yang “terasing”, hal ini terjadi pada partai seperti PAN dan Golkar karena itu wajar jika para pemilih PAN sekitar 41% dan Golkar 54% beralih ke partai lain seperti PKS dan Partai demokrat (3). Meski PKB dan PDIP memiliki pemilih yang tradisional dan primordial, namun faktor ideologis dan primordialisme kelihatannya mulai memudar digantikan oleh pragmatisme, sehingga banyak pemilih PKB sekitar 53% dan PDIP 41% beralih ke partai lain seperti Partai Demokrat, Hanura dan Gerindra; (4). Meski pemilih PKS memiliki loyalitas yang tinggi dan antara PKS dengan pemilihnya memiliki hubungan yang “bersekutu”, namun kasus di Malang dalam pileg 2009 ini sekitar 16% pemilih PKS berpindah ke partai lain.

Selain faktor tersebut diatas, ada faktor lain yang menjadi penentu tingkat volatilitas pada pemilu kali ini sangat tinggi, antara lain : (1). Banyaknya partai (38 partai) yang menjadi peserta pemilu membuat pilihan pemilih menjadi relatif bervariasi. Contoh jika pada pemilu tahun 2004 pemilih memilih PAN namun dalam kurun lima tahun belakangan partai ini kurang mampu mengagregasikan kepentingan-kepentingan pemilih maka mereka bisa memilih Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Hanura, atau Gerindra. Pemilih PKB yang tidak berkenan memilih PKB karena sesuatu hal bisa beralih ke PKNU dan banyak contoh lain

yang membuat pemilih bisa memilih partai sesuai dengan pilihan hati nuraninya; (2). Sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka dengan daftar terbuka dengan calon jadi berdasar suara terbanyak, membuat persaingan antar caleg di suatu daerah pemilihan menjadi demikian sengit, baik kompetisi antar caleg sesama partai maupun kandidasi antar caleg berbeda partai dalam rangka mendapatkan dukungan konstituen. Dengan cara persuasi sampai pada penggunaan cara *money politick*; (3). Golput, mereka yang tergolong tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu (tidak nyoblos) merupakan fenomena yang menarik. Menarik karena pada pemilu kali hampir kurang 40% pemilih tidak mengikuti pemilu. Diberbagai ulasan media massa golput adalah kelompok pemilih yang memenangkan pemilu tahun 2009 karena suaranya jauh melebihi perolehan suara partai (termasuk di Malang). Banyak hal yang mendorong pemilih melakukan sikap golput anantara lain seperti : tidak terdaftar dalam DCT, pemilu rumit sehingga mereka enggan datang, kinerja partai yang dipilihnya dulu sangat buruk

Karena itu tidaklah berlebihan jika pemilih di kota Malang dapat kategorikan sebagai : (1). pemilih yang cenderung cair, rasional, pragmatis dan tidak tabu jika beralih ke partai lain. (2). Tingginya tingkat volatilitas dan mudarnya tingkat loyalitas pemilih partai adalah konsekuensi dari kurang kongruensinya antara identifikasi pemilih kepada partai dengan kemampuan partai melakukan kerja politik berdekatan dengan aspirasi massa pemilihnya.

C. Komparasi Partisipasi Masyarakat Kota Malang Dalam Pemilihan Umum

Komparasi sebenarnya membandingkan dua gejala yang memiliki kesamaan sekaligus juga perbedaan. Karena itu, ketika membandingkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu - dua parameter tersebut selalu menyertainya. Dalam ulasan ini di komparasikan : (1). Partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2004 dibandingkan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2009. (2). Partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2009 dibandingkan dengan Partisipasi masyarakat dalam Pilpres tahun 2009. (3). Anatomi golput : Komparasi dalam pemilu 2004 dan pemilu 2009. Hipotesis yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah : *Pertama*, Ditinjau dari sudut pandang

besaran jumlah pemilih yang melakukan pencoblosan /pencontrengan - partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2004 lebih baik dibanding partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2009. *Kedua*, Ditinjau dari sudut pandang besaran jumlah pemilih yang melakukan pencoblosan/pencontrengan - partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 lebih baik dibanding partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2009. *Ketiga*, Golput atau tidak berpartisipasi dalam pemilu merupakan gejala yang sangat menarik. Menarik karena dalam dua pileg tahun 2004 dan tahun 2009 - golput adalah kekuatan yang memenangkan pemilu – jumlah akumulasi perolehan suara melebihi suara partai apapun. Namun dalam pilpres 2009 ada kecenderungan golput secara agregat agak menurun dibanding pileg 2009. Mengapa demikian ? berikut ini ulasannya.

1. Partisipasi Masyarakat di Kota Malang : Pileg 2009 lebih buruk dibanding Pileg 2004.

Perbaikan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka dengan daftar terbuka dengan calon jadi berdasarkan nomor urut (2004) dirubah menjadi sistem proporsional terbuka dengan daftar terbuka dengan calon jadi berdasarkan suara terbanyak (2009) digagas untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Perubahan ini juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan legislatif. Asumsinya sistem baru akan memperbaiki kadar keterwakilan dari dua sisi kepentingan : *Pertama*, kepentingan caleg - mereka secara perorangan mampu menggaet massa sebanyak-banyaknya; (2). *Kedua*, kepentingan komunitas - mereka mengorganisir diri untuk mengungus secara bersama-sama calon legislatif dari partai apapun yang dekat dengan para pemilih secara : psikologis, komunitas, etnisitas, religiusitas dan kedaerahan untuk membawakan aspirasi-aspirasi yang mengemukakan dari komunitas tersebut. Dengan demikian, bertemunya dua sisi kepentingan caleg dan komunitas ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti pemilihan legislatif. Namun yang terjadi justru sebaliknya - tingkat partisipasi masyarakat kota Malang dalam batas-batas tertentu cenderung mengalami penurunan.

Secara akumulatif menurunnya tingkat partisipasi masyarakat mengikuti

pemilihan legislatif disebabkan banyak faktor, antara lain seperti tengara negatif berikut ini : (a). Brengseknya kinerja partai - tak selaras dengan harapan konstituen, hal ini membuat konstituen enggan memilih. (b). Rumitnya sistem pemilihan – menyulitkan pilihan pemilih, membuat pemilih salah pilih bahkan salah conteng.(c), situasi politik stagnan dan *demagog* - bikin masyarakat apatis, memilih atau tidak memilih tak akan merubah apa-apa. (d). Tak selesai konflik internal beberapa partai – membingungkan pilihan kontituen, karena itu lebih baik tak memilih. (e). Kinerja KPUD buruk - banyak pemilih tak terdaftar di DPT, dan banyak pemilih yang tak dipanggil untuk ikut pemilihan. (f). Banyak partai – banyak pilihan, membingungkan pemilih - lebih baik tak memilih. Tengara seperti ini banyak diulas di berbagai : seminar, penelitian dan tulisan di media massa.

Tengara negarif, tentang faktor-faktor yang menjadi pemicu menurunnya tingkat partisipasi masyarakat seperti diurai atas bisa benar bisa tidak, karena itu perlu di uji kebenarannya melalui penelitian yang mendalam. Berdasarkan tabel 5 diajukan diskursus : “Di banding pileg 2004, semakin menurun besaran jumlah pemilih legislatif tahun 2009, semakin menurun tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu legislatif 2009”. Karena itu pertanyaan selanjutnya : ”benarkah pileg 2009 lebih buruk dibanding pileg 2004 – jika ditinjau dari sudut pandang besaran tingkat partisipasi masyarakat” ? Untuk menjawab pertanyaan ini di jabarkan melalui komparasi data pileg 2004 dan pileg 2009 berikut ini :

Tabel 17
Komparasi : Partisipasi Masyarakat dalam Pileg 2004 dan Pileg tahun 2009

Daerah Pemilihan Kecamatan	Jumlah Pemilih berdasar DPT	Pemilih Menggunakan hak pilih	Prosentase Menggunakan Hak pilih	Prosentase Menggunakan Hak pilih	Pemilih Menggunakan hak pilih	Jumlah Pemilih berdasar DPT
	Pileg	2009			Pileg	2004
Kedungkandang	123.829	82.392	66,53%	74,43%	87.541	117.608
Sukun	131.996	89.121	67,51%	74,80%	95.062	127.080
Klojen	84.242	51.918	61,63%	68,44%	63.733	93.123
Blimbing	124.150	79.558	64,08%	74,29%	91.750	123.488
Lowokwaru	106.668	71.518	67,04%	60,93%	86.349	141.742
Jumlah	570.885	374.507	65,60%	70,38%	424.435	603.029

Sumber : Data skunder dari KPUD Kota Malang yang diolah

Komparasi partisipasi masyarakat kota Malang dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif tahun 2004 dan pemilihan legislatif tahun 2009, seperti tertera dalam tabel diatas di deskripsikan sebagai berikut :

- (1). Dibanding pileg 2004, pileg kali ini (2009) terjadi kenaikan jumlah pemilih di tiga daerah pemilihan : Kedungkandang, Sukun dan Blimbing sebesar 10.799. Sementara di daerah pemilihan Klojen dan Lowokwaru justru sebaliknya - terjadi penurunan jumlah pemilih sebesar 39.908. Namun secara agregat di kota Malang dalam pileg 2009 kali ini terjadi penurunan jumlah pemilih sebesar 32.144 atau setara 5,33%.
- (2). Jumlah pemilih yang melakukan pencoblosan pada pileg 2004 sebesar 424.435 suara setara dengan 70,38%, pada pileg 2009 yang melakukan pencontrengan sebesar 374.507 orang setara dengan 65,60%. Dengan demikian pada pemilu legislatif tahun 2009 ini, di kota Malang terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 49.928 orang atau setara dengan 4,78%.
- (3). Perbedaan mencolok terjadi di daerah pemilihan Lowokwaru, jumlah pemilih pileg 2004 di DP ini terdaftar di DPT sebesar 141.742 orang, sementara pada pileg 2009 jumlah pemilih yang terdaftar di DPT sebesar 106.668 orang. Perbedaan ini bisa terjadi karena “kesalahan” dalam pendataan pemilih. Faktanya, pada pileg 2004 mahasiswa yang berdomisi sementara di DP Lowokwaru - memiliki KTP Malang atau tidak - tetap di daftar sebagai pemilih Lowokwaru, sementara pada pileg 2009 hanya mahasiswa yang memiliki KTP kota Malang saja yang di daftar sebagai pemilih. Akibatnya di Lowokwaru jumlah pemilih di dua pileg tersebut terjadi perbedaan yang cukup signifikans yakni sebesar 35.074.
- (4). Di empat daerah pemilihan seperti : Kedungkandang, Sukun, Klojen,dan Blimbing prosentase pemilih yang melakukan pencontrengan pada pileg 2009 ini`- mengalami penurunan rata-rata sebesar 8,55% dibanding jumlah pemilih yang melakukan pencoblosan pada pemilihan legislatif tahun 2004. Sementara di daerah pemilihan Lowokwaru justru sebaliknya - pileg tahun2009 ini - tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan sebesar 6,11% dibanding

pemilihan legislatif tahun 2004.

Dari deskripsi diatas di analisis sebagai berikut : (1). Dibanding pileg 2004 pada pileg 2009 ini terjadi perbaikan dalam pengolahan data pemilih contohnya di Lowokwaru. Perbaikan ini menentukan mereka yang nyata-nyata memiliki hak pilih untuk mengikuti pemilihan legislatif di kota Malang didaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), sementara mereka yang hanya berdomisi sementara dan tidak memiliki KTP Malang tidak didaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). (2). Perubahan sistem pemilu tahun 2004 yang menggunakan sistem proporsional terbuka dengan daftar terbuka dengan calon jadi berdasarkan nomor urut dimodifikasi menjadi suara terbanyak tahun 2009 ini, kurang diikuti oleh meningkatnya partisipasi masyarakat – yang terjadi justru sebaliknya - jumlah pemilih yang melakukan pencontrengan turun hingga 4,78%.

Perlu ditegaskan bahwa perbaikan pengolahan data pemilih di DPT, perbaikan kualitas rekrutmen politik melalui sistem suara terbanyak, ternyata tak dibarengi oleh meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif.- karena itu sebenarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pileg tahun 2004 lebih baik dibanding tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2009.

2. Partisipasi Masyarakat di Kota Malang : Pilpres 2009 Lebih Memiliki Daya tarik Dibanding Pileg 2009.

Pemilihan legislatif tahun 2009 memungkinkan tingkat partisipasi masyarakat mengikuti pencontrengan lebih besar dibanding pemilu sebelumnya atau pemilu presiden tahun itu juga. Asumsinya, dengan sistem pemilu proporsional terbuka dengan daftar terbuka dengan calon jadi berdasarkan suara terbanyak - memberi peluang kepada semua caleg dari berbagai partai yang mengikuti pemilu untuk : bersosialisasi, bernegoisasi, berkontestasi, *ber-marketing politik* dan berkampanye kepada masyarakat untuk menarik mereka menjadi konstituennya. Karena itu asumsi bahwa kampanye dapat meningkatkan partisipasi masyarakat mendapat tempat di ulasan ini. Namun seperti yang kita ketahui ternyata sistem ini malah membuat tingkat partisipasi masyarakat lebih rendah dibanding pemilu sebelumnya atau pilpres dua bulan kemudian.

Ditinjau dari sudut pandang kesertaan masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pemilu tahun 2009 - antusiasme masyarakat kota Malang – lebih besar berpartisipasi mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden daripada mengikuti pemilihan legislatif. Perbedaan yang cukup signifikan ini tercermin dalam komparasi data berikut ini :

Tabel 18
Komparasi :Partisipasi Masyarakat Kota Malang
dalam Pileg dan Pilpres tahun 2009

Daerah Pemilihan (Kecamatan)	Jumlah Pemilih berdasar DPT	Pemilih Menggunakan hak pilih	Prosentase Menggunakan Hak pilih		Prosentase Menggunakan Hak pilih	Pemilih Menggunakan hak pilih	Jumlah Pemilih berdasar DPT
	Pileg	2009				Pilpres	2009
Kedungkandang	123.829	82.392	66,53%		71,98%	91995	127.806
Sukun	131.996	89.121	67,51%		75,72%	101.765	134.390
Klojen	84.242	51.918	61,63%		68,34%	59.273	86.736
Blimbing	124.150	79.558	64,08%		73,29%	95.083	129.734
Lowokwaru	106.668	71.518	67,04%		74,22%	82.653	111.366
Jumlah	570.885	374.507	65,60%		73,01%	430.769	590.032

Sumber : data skunder diolah dari KPUD kota Malang

Keterangan : data diatas mengabaikan suara tak sah

Mengkomparasikan tingkat partisipasi masyarakat kota Malang dalam mengikuti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2009 seperti tabel diatas, di dideskripsikan sebagai berikut :

- (1). Jika dibandingkan antara jumlah pemilih legislatif tahun 2009 sebesar 570.885 dan jumlah pemilih presiden dan wakil presiden tahun 2009 sebesar 590.032 terdapat peningkatan jumlah pemilih sebesar 19.147 orang – setara dengan (3,35%). Peningkatan jumlah pemilih ini disebabkan karena KPUD Kota Malang mau memperhatikan kritik keras dari masyarakat dan bersedia memperbaiki ketidakberesan penetapan DPT. Faktor lain masuknya pemilih pemula yang pada pilpres 2009 di data dalam DPT dan boleh mengikuti pemilihan presiden.
- (2). Secara akumulatif di kota Malang terjadi peningkatan partisipasi masyarakat sebesar (7,41%), jika dibandingkan antara besaran jumlah pemilih yang

melakukan pencontrengan pada pemilu legislatif sebesar 374.507 setara 65,60% dengan jumlah pemilih yang melakukan pencontrengan pada pemilihan presiden dan wakil presiden sebesar 430.769 setara 73,01%. Kesederhanaan proses penyelenggaraan pilpres 2009 dibandingkan kerumitan penyelenggaraan pileg 2009, memungkinkan tingkat partisipasi pemilih lebih besar pada pilpres dibanding pileg. Faktor lain SBY memiliki daya *magnituted* yang luar biasa sehingga menarik perhatian masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilpres.

- (3). Lima daerah pemilihan setingkat kecamatan di kota Malang, dalam penyelenggaraan pileg 2009 - angka partisipasi masyarakat berkisar antara 61% s/d 68%, sementara dalam penyelenggaraan pilpres 2009 angka partisipasi masyarakat berkisar antara 68% s/d 76%. Angka ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden lebih baik jika dibandingkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif.
- (4). Daerah pemilihan Sukun merupakan daerah pemilihan yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat terbesar - baik pada pileg sebesar (67,51%) maupun pilpres sebesar (75,72%), sementara daerah pemilihan Klojen adalah daerah pemilihan yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat terendah – baik pileg sebesar (61,63%) maupun pilpres sebesar (68,34%). Hal ini menguatkan tesis bahwa masyarakat daerah pinggiran kota seperti Sukun, Kedungkandang, Lowokwaru lebih peduli terhadap pileg dan pilpres dibanding masyarakat daerah perkotaan seperti Klojen dan Blimbing.
- (5). Di Kota Malang, dari pileg ke pilpres tahun 2009 terjadi peningkatan partisipasi masyarakat di daerah pemilihan : Kedungkandang sebesar 5,45%; Sukun sebesar 5,21%, Klojen sebesar 6,71%, Blimbing sebesar 9,21% dan Lowokwaru sebesar 7,18%. Dengan demikian Pilpres yang memilih pemimpin negara ternyata lebih memiliki daya *magnituted* dibanding pileg yang memilih multi partai, memilih caleg kadang tak di kenal dan memilih “sesuatu” dengan tata cara yang cenderung rumit.
Yang perlu digarisbawahi dari uraian diatas adalah : dibanding pileg 2009 -

meningkatnya jumlah pemilih pada setiap daerah pemilihan di pemilihan presiden tahun 2009, kemudian diikuti dengan meningkatnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih rata-rata sebesar 7,41% merupakan *trend* positif bagi perkembangan partisipasi masyarakat. Karena itu tidak berlebihan jika - pemilihan presiden tahun 2009 di kota Malang – sebenarnya, lebih memiliki daya tarik tersendiri - dibanding pemilihan legislatif tahun 2009. Implikasinya - tingkat partisipasi masyarakat dalam pilpres sebesar 73,01% lebih besar dibanding tingkat partisipasi masyarakat dalam pileg yang hanya diikuti 65,60% pemilih.

3. Golput di Kota Malang : Suara Partai Kalah Dengan Suara Golput

Fenomena golput adalah gejala seperti yang dijabarkan uraian terdahulu, orang tidak mau berpartisipasi dalam pencontrengan disebabkan karena : (a). Buruknya kinerja partai- tak sesuai harapan pemilih; (b). Rumitnya sistem pemilihan; (c), situasi politik stagnan dan *demagog* - pemilu tak merubah apa-apa. (d). Konflik internal beberapa partai – membingungkan pilihan kontituen; (e). Kinerja KPUD buruk - banyak pemilih tak terdaftar di DPT; (f). Banyak partai – membingungkan pemilih - lebih baik tak memilih. Golput menang di dua kali pemilu legislatif di kota Malang, data berikut sebagai contoh :

Tabel 19
Perbandingan
Golput dengan Perolehan Suara Partai Dalam Pileg 2009 di Kota Malang

Partai/Golput	Sukun	Kedung Kandang	Lowok waru	Klojen	Blimbing	Jumlah
Golput	42.875	41.437	35150	32.324	44.592	196.378
Partai Demokrat	17248	15151	17355	14464	24832	89050
PDIP	18762	15985	11370	7150	12118	65385
PKB	8081	11880	3309	5499	6762	35531
PKS	5323	5579	6201	3312	5231	25646
Golkar	9063	4625	3091	2683	4887	24349
PAN	2067	3396	4394	3431	3556	16844
GERINDRA	3551	3970	2543	1292	2911	14267
PDS	2696	1820	1587	2157	2103	10363
Hanura	2513	1823	2021	763	2982	10102
PKPB	752	901	4984	655	464	7756

Sumber : Data skunder diolah dari KPUD kota Malang

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut : (1). Akumulasi suara golput sebesar 196.378 di kota Malang, tidak ada satupun partai yang menyainginya, yang terdekat hanya partai demokrat yang akumulasi perolehan suaranya dikota Malang mencapai 89.050 hampir separo lebih sedikit dari suara golput, sementara PDIP hanya 1/3 dari golput. (2). Jika ditelaah per daerah pemilihan tidak ada satupun partai yang mengguli suara golput di DP tersebut. (3). Partai dan wakil rakyat nampaknya kurang dipercaya oleh masyarakat karena besaran suara golput semakin besar dan bisa mengalah suara partai, beruntung suara golput ini terkonsolidasi dengan baik sehingga kurang kalau tidak mau dikatakan tidak mempengaruhi sistem politik; (4).namun demikian, Gejala semacam ini, jika terus berkembang akan merugikan legitimasi institusi pemerintah terutama lembaga legislatif, karena itu perlu upaya sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk memperbaiki : citra dan kualitas demokrasi, citra KPU, citra partai politik dan lembaga-lembag formal pemerintahan.

Dari Pileg tahun 2004 ke pileg tahun 2009 akumulasi besaran suara golput semakin meningkat, hal ini tercermin seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 20
Perbandingan
Golput Pada Pileg 2004 dan Pileg 2009

Kecamatan	Pemilih Berdasar kan DPT	Tak Menggunakan Hak pilih	Prosentase tak Menggunakan Hak pilih		Prosentase tak menggunakan hak pilih	Pemilih Tak menggunakan Hak ilih	Pemilih berdasar DPT
		Pileg	2009		Pileg	2004	
Kedungkandang	123.829	41.437	33,47%		25,57%	30.067	117.608
Sukun	131.996	42.875	32,49%		25.20%	32.018	127.080
Klojen	84.242	32.324	38,37%		31,56%	29.396	93.129
Blimbing	124.150	44.592	35,92%		25,71%	31.738	123.488
Lowokwaru	106.668	35.150	32,96%		39,07%	55.375	141.724
Jumlah	570.885	196.378	34,40%		29,62%	178.594	603.029

Sumber : data skunder yang di olah.

Analisis data tabel : (1). Dari pemilihan legislatif 2004 besaran golput sebesar 29,62% meningkat menjadi 34,40% pada pemilu legislatif 2009. Jika di kalkulasi prosentase golput meningkat 4,78%. (2). Kecuali di DP Lowokwaru

yang turun 6, 11%, di semua daerah pemilihan dilingkungan kota Malang angka golput mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 7,5%, hal ini menandakan berkurangnya makna pemilihan legislatif bagi orang-orang golput untuk perbaikan iklim demokrasi dan pengembangan sistem politik di aras lokal. (3). Dengan gejala meningkatnya angka golput – jika tidak tertangani dengan baik akan meningkatkan apatisme masyarakat – terutama dalam upaya ikut serta dalam proses pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, ikut meningkat kehidupan bersama yang lebih baik di kota Malang.

Namun kita masih berharap bahwa suatu ketika, pemilu legislatif akan diikuti lebih dari 90% pemilih seperti yang terjadi pada pemilihan legislatif tahun 1999 dengan kualitas demokrasi dan kualitas keterwakilan yang lebih baik. Harapan itu agak sulit dilaksanakan sekarang ini, tetapi bukan tidak mungkin dilaksanakan. Sebagai contoh pemilihan presiden tahun 2009 dua bulan setelah pileg, ternyata angka golput turun cukup menggembirakan artinya turunnya angka golput berarti meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam turut serta pemilihan presiden 2009, seperti tabel berikut ini :

Tabel 21
Perbandingan
Golput Pada Pileg 2009 dan Pilpres 2009 di Kota Malang

Kecamatan	Pemilih Berdasar kan DPT	Tak Menggu nakan Hak pilih	Prosentase tak Mengguna kan Hak pilih		Prosentase tak mengguna kan hak pilih	Pemilih Tak menggu nakan Hak ilih	Pemilih berdasar DPT
		Pileg	2009		Pilpres	2009	
Kedungkandang	123.829	41.437	33,47%		28,02%	35.811	127.806
Sukun	131.996	42.875	32,49%		24,28%	32.625	134.390
Klojen	84.242	32.324	38,37%		31,66%	27.463	86.736
Blimbing	124.150	44.592	35,92%		26,71%	34.651	129.734
Lowokwaru	106.668	35.150	32,96%		25,78%	28.713	111.366
Jumlah	570.885	196.378	34,40%		26,99%	159.263	590.032

Sumber : data skunder yang di olah.

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut : (1). Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 menarik perhatian para pemilih sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih meningkat 7,41 % dibanding pemilihan

legislatif 2009. Kebalikannya angka golput menurun 7,41% pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2009 dibanding angka golput pada pileg 2009. (2). SBY – Budiono, Megawati-Prabowo, Jusuf Kalla-Wiranto memiliki daya *magnituted* bagi para pendukungnya, namun harus diakui bahwa SBY lebih memiliki daya tarik tersendiri dibanding tokoh yang lain. (3). Hembusan Danny JA melalui LSI-nya untuk pemilu satu putaran - menggugah para pendukung masing-masing calon untuk berpartisipasi dalam pilpres 2009.

BAB V

PENUTUP

Akhirnya melalui proses penelitian yang panjang, penulis menemukan beberapa hal penting terkait dinamika politik demokrasi Indonesia khususnya di Kota Malang sebagai lokasi penelitian ini. Jumlah pemilih pada pemilu 2009 lebih kecil dibanding jumlah pemilih legislatif pada pemilu tahun 2004 yakni sebesar 603.029 pemilih, dan pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 424.435 atau sebesar 70,38%. Kecilnya angka pemilih pada pemilu 2009 bukan berarti karena disebabkan oleh sikap politik masyarakat yang apatis terhadap pemilu (golput) namun hal ini lebih disebabkan oleh hal teknis pada proses pendataan pemilih yang dilakukan secara hati-hati. Pada pemilu 2009, warga masyarakat yang berhak memilih adalah warga yang memiliki KTP atau Kartu Keluarga. Sedangkan pada pemilu 2004, warga masyarakat yang berhak memilih bukan hanya yang meliki KTP namun yang memiliki tanda domisi juga didata sebagai pemilih.

Pada penelitian ini juga ditemukan adanya pergeseran sikap politik masyarakat kota Malang. Pada pemilu 1999 dan 2004 (pemilu 2004, PDIP unggul pada pemilihan legislatif), pemilih kota Malang lebih memilih partai-partai besar seperti PDIP, PKB, PPP. Namun pada pemilu 2004 dan 2009 hal itu tidak terjadi lagi, yaitu masyarakat kota Malang lebih menyukai partai baru yaitu Partai Demokrat. Partai ini sangat mengesankan – partai yang di didirikan oleh SBY ini memperoleh suara terbanyak di kota Malang. Partai Demokrat memenangkan pemilihan di tiga daerah pemilihan yakni : Lowokwaru mendapat 17.355 suara. Klojen mendapat 14.464 suara, Blimbing mendapat 24.832 suara. Sementara di dua DP Sukun mendapat 17.248 suara dan DP Kedungkandang mendapat 15.151 suara Partai Demokrat kalah tipis dengan suara PDIP. Secara akumulatif perolehan suara Partai Demokrat di kota Malang sebesar 89.050 suara.

Tinjauan komparasi antara pemilu 2004 dan 2009 menunjukkan, partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2009 lebih buruk dibanding

pemilihan legislatif tahun 2009. Pemilihan presiden tahun 2009 lebih memiliki daya tarik dibanding pemilihan legislatif tahun 2009, dan suara golput pada pemilu 2004 dan 2009 mengalahkan suara partai.

Dinamika proses politik tersebut menginginkan adanya pembenahan langkah politik dari institusi politik (parpol) dan pelaku politik (aktor politik/kandidat) untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat sebagai pelaku utama yang memberikan legitimasi kekuasaan atau jabatan politik, baik pada kekuasaan eksekutif (presiden) maupun kekuasaan legislatif (DPR) untuk mewujudkan politik demokrasi yang bebas dan imbang dalam meraih cita-cita bangsa yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo. Mariam, 1992, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Deden Faturahman, 2002 dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, UMM Press Malang.
- Frank N. Magill (eds.), 1996, *International Encyclopedia of Government and Politics*, Singapore Toppan Company PTE LTD.
- Hamidi, 2004, *Metode Penelitian kualitatif*, UMM Press, Malang
- Haris, Syamsuddin, 2005, *Pemilu langsung di Tengah Oligarki Partai*, PT Gramedia, Jakarta
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*, PLOD UGM, Yogyakarta
- Heru Priyatmoko, 2004, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2004 di Kota Malang (Skripsi)*, UMM. Malang.
- Huntington. P. Samuel, 1983, *Tertib Politik Didalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Rajawali Press, Jakarta,
- Jainuri, 2005, *Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Kota Malang Dalam Pemeilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Putaran I tahun 2004 (penelitian)*, UMM, Malang.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, 2004, *Menuju Pemilu yang Berkualitas*, Divisi Lembaga, penelitian, Pendidikan Politik dan Sosialisasi, Malang
- Lawson, Key, 1989, *The Human Polity : An Introduction To Political Science*, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Manheim, Jarol B, dan C Rich, Richard C, 1981, *Empirical Political Analysis : Research Methods In Political Science*, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Maswadi Rauf, 2001, *Konsensus dan Konflik Politik : Sebuah Penjajakan Teoritis*, Dirjen Dikti, Jakarta
- Ramlan Surbakti, 2006, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana

Indonesia, Jakarta

- Samuel P. Huntington, 1995, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, 1984, *Partisipasi Politik Di negara Berkembang*, Sangkala Pulsar, Jakarta
- Faisal, Sanapiah, 1999, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moleong, Lexy, 2002, *Metode Penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mohtar Mas' oed dan Colin Mac Andrews, 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta